



Kabupaten **Bintan**



LAPORAN KINERJA

Kabupaten Bintan

2019

Kabupaten Bintan

LAPORAN KINERJA 2019



Apri Sujadi
Bupati Bintan

Dengan memanjakan puji sukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bintan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Kabupaten Bintan ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2019 dalam mewujudkan visi “ Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan) ” Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2019 ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas kinerja guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu membawa perubahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Akhirnya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim penyusun dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan Laporan ini. Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Seri Bentan, Maret 2020
BUPATI BINTAN

H. APRI SUJADI S. Sos

“Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintang Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)”

BAB I	6
Pendahuluan	6
Gambaran umum	6
Isu Strategis	13
Sistematika Penulisan	18
BAB II	19
Penetapan &	19
Perencanaan Kinerja	19
Visi	19
Misi	21
Perjanjian Kinerja	21
BAB III	24
Akuntabilitas Kinerja	24
Capaian Kinerja	25
Akuntabilitas Keuangan	64
BAB IV	70
Penutup	70

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Bintan yang sebelumnya Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di manca negara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan karena itulah julukan Kepulauan "Segantang Lada" sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Pada kurun waktu 1722-1911 terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.

Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia) Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir.

Kepulauan Riau menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan diberi status daerah Otonom Tingkat II berdasarkan surat Keputusan delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No9/Deprt.

Menjadi bagian dari Provinsi Riau Kabupaten Kepulauan Riau dalam perjalanannya mengalami beberapa kali pemekaran. Pada tahun 1983 Kota Madya Batam dibentuk sehingga Kota Batam tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau.

Pada tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Riau Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Tahun 2001 Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Tahun 2002 Kabupaten Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang Kota Batam Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna bergabung membentuk Provinsi Riau dengan disahkannya Undang - undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau kembali dimekarkan dengan dibentuknya Kabupaten Lingga

Akhirnya pada tahun 2006 berdasarkan PP No 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006 Kabupaten Kepulauan Riau resmi berubah nama menjadi "Kabupaten Bintan"

Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 108°30' Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.411,92 Km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 Km² (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km² (98,50%).

Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan kontinental yang disebut Paparan Sunda Morfologi. Pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari muka laut. Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Bintan 348 meter Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu

sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek dangkal dan tidak lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis dengan temperatur terendah 21,6 derajat Celcius dan tertinggi 37,7 derajat Celcius.



Sebelah Utara

- ▶ Natuna Anambas
- ▶ Malaysia

Sebelah Selatan

- ▶ Kabupaten Lingga

Sebelah Barat

- ▶ Kota Batam
- ▶ Kota Tanjungpinang

Sebelah Timur

- ▶ Provinsi Kalimantan Barat

PETA KABUPAATEN BINTAN

Kependudukan

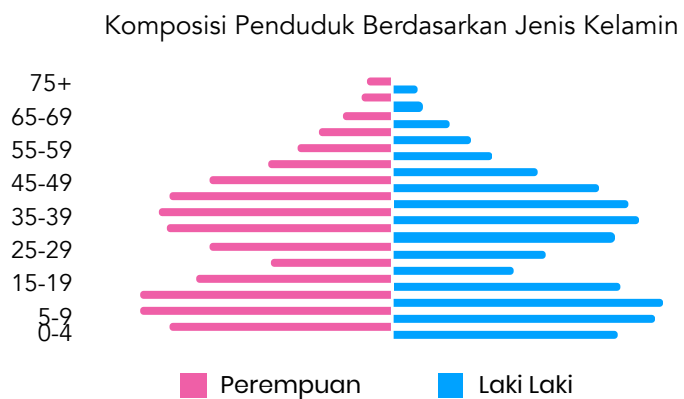
Penduduk Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1 (Satu) persen berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Bintan tahun 2019 berpenduduk sebesar 155.456 jiwa. Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 44.733 jiwa (28,78%) sedangkan yang terendah adalah dikecamatan Mantang sebanyak 4.230 jiwa (2.72%).

Table 1.1

Kepadatan Penduduk Kabupaten Bintan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km2)
Teluk Bintan	12.544	11.160	89
Seri Kuala Lobam	12.350	16.976	137
Bintan Utara	4.326	22.385	517
Teluk Sebong	28.572	17.461	61
Bintan Timur	10.018	44.733	447
Bintan Pesisir	11.611	6.962	60
Mantang	6.361	4.230	66
Gunung Kijang	19.289	14.450	75
Toapaya	17.648	12.446	71
Tambelan	9.102	4.653	51
Total	131.821	155.456	118

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bintan



Perbandingan persentase antara laki-laki dengan perempuan sebesar 51:49 persen (%) dengan jumlah laki-laki sebesar 7.9880 jiwa berbanding jumlah perempuan 7.5576 jiwa. Sedangkan untuk Sex Ratio pada tahun 2019 di Kabupaten Bintan sebesar 106 artinya dalam 106 laki-laki terdapat 100 perempuan. Kelompok umur 35-39 masih mendominasi dengan 73 ribu jiwa laki-laki dan 77 ribu jiwa perempuan.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio	%
	L	P	Total		
Teluk Bintan	5.794	5.366	11.160	108	7,18
Seri Kuala Lobam	8.602	8.374	16.976	103	10,92
Bintan Utara	11.316	11.069	22.385	102	14,40
Teluk Sebong	9.045	8.416	17.461	107	11,23
Bintan Timur	22.956	21.777	44.733	105	28,78
Bintan Pesisir	3.623	3.339	6.962	109	4,48
Mantang	2.240	1.990	4.230	113	2,72
Gunung Kijang	7.524	6.926	14.450	109	9,30
Toapaya	6.398	6.048	12.446	106	8,01
Tambelan	2.382	2.271	4.653	105	2,99
Total	79.880	75.576	155.456	106	100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bintan					

Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 118 penduduk/Km². Untuk tingkat kepadatan penduduk paling besar berada di Kecamatan Bintan Utara diikuti dengan Kecamatan Bintan Timur serta Sri Kuala Lobam sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di wilayah Kabupaten Bintan berada di Kecamatan Tambelan.

Tabel 1.3
Kondisi Demografi Kabupaten Bintan Tahun 2019

Indikator	Satuan	Jumlah
Jumlah Penduduk	Jiwa	155.456
Laki-Laki	Jiwa	79.880
Perempuan	Jiwa	75.576
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1
Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	118
Sex Ratio		106
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bintan *		

Kewenangan

Dalam kondisi umum Kabupaten Bintan akan diuraikan mengenai kondisi Kabupaten Bintan sebagai penyelenggara pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 dan PP no 18 Tahun 2016 bahwa urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan pemanfaatandan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan bidang pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasiusaha kecildan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintah
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasr lainnyadan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Sedangkan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi ciri

husus dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat disebutkan bahwa urusan wajib yang dilaksanakan meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, Perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketanagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, kepegawaian, persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.

Sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah 3 tahun 2007 dinyatakan bahwa yang termasuk dalam urusan pilihan meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan keimigrasian

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah, Kabupaten Bintan menetapkan organisasi kewenangan dan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat daerah, dinas daerah, kantor daerah dan pemerintah kecamatan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 tahun 2018 Struktur organisasi dari Sekretariat Lembaga Teknis Daerah Dinas Badan dan Kantor di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

A. Sekrtariat

17. Sekertariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten terdiri dari :
 - a. Asisten administrasi pemerintah
 - b. Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan
 - c. Asisten administrasi umum
 - d. Staf ahli
3. Bagian terdiri dari :
 - a. Bagian pemerintahan
 - b. Bagian Pertanahan
 - c. Bagian hukum
 - d. Bagian perekonomian
 - e. Bagian Pembangunan
 - f. Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - h. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

- i. Bagian Umum
- j. Bagian Organisasi
- k. Bagian Protokol

Masing-masing bagian membawahi beberapa sub bagian

18. Sekretariat DPRD susunan organisasi sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- d. Bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan
- e. Masing-masing point 2 s/d 5 membawahi beberapa subbag

19. Lembaga Teknis Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 7 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari Dinas dan Badan yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang terdiri yaitu:

- 1. Inspektur daerah Tipe A
- 2. Dinas Pendidikan Tipe A
- 3. Dinas Kesehatan Tipe A
- 4. Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Tipe B
- 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C
- 6. Dinas Sosial Tipe B
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
- 8. Dinas Tenaga Kerja Tipe C
- 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A
- 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A
- 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
- 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
- 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
- 14. Dinas Perhubungan Tipe B
- 15. Dinas Komunikasi dan informatika tipe A
- 16. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Tipe A
- 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C
19. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tipe A
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B
21. Dinas Perikanan Tipe A
22. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
24. Badan Pendapatan Daerah Tipe B
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kecamatan Bintan Timur
29. Kecamatan Bintan Utara
30. Kecamatan Gunung Kijang
31. Kecamatan Teluk Bintan
32. Kecamatan Teluk Sebong
33. Kecamatan Toapaya
34. Kecamatan Bintan Pesisir
35. Kecamatan Mantang
36. Kecamatan Seri Kuala Lobam
37. Kecamatan Tambelan

20. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Sesuai Perda No7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan

Susunan organisasi RSUD pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Satuan Pengendali Internal
- d. Komite Medik
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Pelayanan Medik dan Keperawatan
- g. Penunjang medik dan non medik
- h. Instalasi

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Bintan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kabupaten Bintan didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang berjumlah 3.228 orang dengan komposisi Perempuan sebanyak 1.782 orang dan laki-laki 1.506 orang. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, Kabupaten Bintan didominasi oleh Aparatur dengan tingkat pendidikan Strata 1 dengan jumlah 1.782 orang.

Tabel 1.4

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Bintan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	D-I & D-II	D-III	S1	S2	S3	Total
Laki - Laki	14	25	473	89	117	724	64	0	1.506
Perempuan	0	4	281	161	315	992	29		1.782
Total	14	29	754	250	432	1.716	93	0	3.288

Sumber: BKPSDM Kabupaten Bintan

ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan rumusan permasalahan pembangunan maupun yang berasal luar dalam skala regional, nasional maupun internasional. Isu-isu strategis dihasilkan pada tahap perumusan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bintan yang difokuskan pada isu - isu strategis dengan kategori *medium term issues*. Melalui *focus group discussion*, Isu strategis yang dirumuskan diharapkan akan dapat memberikan pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan jangka panjang daerah. Isu strategis yang bisa dimunculkan dari skala lokal, khusus kabupaten Bintan antara lain berupa :

1. Isu Ekonomi

Dalam bidang ekonomi ada 5 isu strategis yang dianggap paling penting, antara lain adalah:

1. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2. Pengembangan Kawasan Minapolitan
3. Pengembangan Pariwisata
4. Peningkatan Aksesibilitas Ke Pulau - Pulau Kecil
5. Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara berskala internasional

a. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Internasional

Pemerintah Kabupaten Bintan mendukung program pemerintah pusat yaitu pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup wilayah yang lebih luas meliputi wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Upaya pengembangan kawasan khusus tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Singapura dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Singapura pada tanggal 25 Juni 2006 tentang Kerjasama Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspek sistem perkotaan nasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, antara lain :

1. Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis;
2. Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi;
3. Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya).
Dalam PP tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah pulau Bintan. Disamping itu, terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan maritim Bintan Timur, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Dompok. Pulau Bintan merupakan wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi.

Keberadaan bonded zones di Bintan menyebabkan kawasan ini tidak asing lagi bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di sektor industri manufaktur. Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan wisatawan mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari Singapura. Ditinjau dari sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam namun Bintan telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjung Pinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Namun demikian, dalam konteks KEK BBK, penyebutan Bintan akan secara implisit diartikan sebagai keseluruhan pulau Bintan.

b. Pengembangan Kawasan Minapolitan

Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dan pada Pasal 63 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraannya. Ini berarti bahwa model-model pemberdayaan akan terus bergulir sehingga penentuan model pemberdayaan yang berbasis sosio-ekologi dan karakteristik daerah nelayan adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, maka wilayah perairan Kabupaten Bintan termasuk salah satu kawasan minapolitan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 88.038,54 Km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.946,13 Km² dan wilayah laut seluas 86.398,33 km² (97,74%). Pada tahun 2009, volume produksi perikanan mencapai 20.083,35 Ton dan mengalami peningkatan produksi sebesar 4,18 persen dari tahun sebelumnya, dengan nilai produksi mencapai 157,76 Milyar Rupiah atau meningkat sebesar 3,56%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Bintan cukup besar, mengingat luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan luas daratannya.

Berdasarkan potensi yang ada maka Pemerintah Kabupaten Bintan melalui SK Bupati Bintan No : 377/VIII/2010, telah menetapkan Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Bintan Timur sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan dengan fokus pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Bintan Timur dengan komoditas ikan pelagis dan demersal, serta pengembangan perikanan budidaya di Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir dengan komoditas rumput laut, kerapu dan teripang.

Dengan di tetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah kawasan minapolitan dimana Kecamatan Mantang sebagai Tempat Budidaya, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Bintan Pesisir sebagai sentra pemasaran dan Kecamatan Bintan Pesisir sebagai penangkapan ikan dan budidaya rumput laut. Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bintan sangat besar karena hampir 98% wilayah Kabupaten Bintan adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Bintan terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Bintan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), padang lamun (seagrass), ikan dan biota laut ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

c. Pengembangan Pariwisata

Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau yang diimplementasikan ke dalam 6 (enam) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata, maka Kabupaten Bintan ini termasuk dalam Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B yang pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata terpadu (Kawasan Lagoi dan Kuala Sempang), ekowisata (Kawasan Air Terjun Gunung Bintan), wisata religi/sejarah (Kawasan Kota Kara dan Bukit Batu), wisata bahari (Kawasan Lagoi, Sakera Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Kawasan Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, kawasan Berakit dan beberapa pulau di Kecamatan Tambelan, Bintan Pesisir dan Mantang), Desa Wisata (Kawal dan Teluk Bakau di Kecamatan Gunung Kijang, Sebondong Pereh, Sei Kecil, Sebondong Lagoi dan Berakit di Kecamatan Teluk Sebondong, Malang Rapat, serta Bintan Bekapur di Kecamatan Teluk Bintan).

d. Peningkatan Aksesibilitas Ke Pulau-Pulau Kecil

Wilayah Kabupaten Bintan berupa wilayah yang terdiri atas beberapa gugusan pulau besar dan kecil, sehingga membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana wilayah dengan biaya tinggi (high cost). Aksesibilitas menuju ke beberapa gugus pulau kecil di Kabupaten Bintan, terutama ke Pulau Tambelan terbatas. Selain itu belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi wilayah, khususnya di beberapa pulau kecil, merupakan salah satu isu utama di Kabupaten Bintan.

- e. Pengembangan infrastruktur jalan, terminal, pelabuhan dan lapangan udara
Selain jaringan jalan, rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat juga diarahkan pada pembentukan simpul-simpul transportasi yaitu berupa terminal transportasi darat, pelabuhan dan lapangan udara.

2. Isu Sosial – Masyarakat

Dalam bidang Sosial-Masyarakat, ada 2 isu strategis di anggap paling penting yakni Pemerataan Penduduk dan Peningkatan Pelayanan Dasar Sinkronisasi Kebijakan/Aturan.

a. Pemerataan Penduduk dan Pelayanan Dasar

Pada tahun 2019 Penduduk Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1 (Satu) persen. Berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan tahun 2019 berpenduduk sebesar 155.456 jiwa Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 44.733 jiwa (28,78%) sedangkan yang terendah adalah dikecamatan Mantang sebanyak 4.230 jiwa (2,72%). Karakteristik geografis yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil menyebabkan jarak menjadi kendala sehingga pembangunan menjadi kurang merata. Selain itu keberpihakan yang terlalu besar pada Free Trade Zone (FTZ) belum dirasakan dampak multiplier-nya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya pelayanan dasar ke beberapa pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan menjadi salah satu isu utama, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya aksesibilitas menuju remote area.

b. Sinkronisasi Kebijakan dan Aturan

Banyak kebijakan antar sektor dan antar daerah yang belum padu dan sinkron sehingga tumpang tindih bahkan bertabrakan satu sama lain. Sinkronisasi kebijakan di sini adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud antara lain berupa izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Dengan demikian, perizinan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bintan, dikeluarkan oleh sesuai dengan kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Isu Lingkungan

Dalam bidang Lingkungan, ada 4 isu strategis di anggap paling penting yakni:

1. Kecenderungan Kawasan Lindung untuk Budidaya
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan
3. Pengolahan Sampah
4. Peningkatan Kualitas Air Baku

a. Kecenderungan Kawasan Lindung Untuk Budidaya

Isu kawasan lindung untuk budidaya muncul karena banyak kegiatan pembangunan baik berupa pembangunan permukiman perkotaan maupun tambang yang merusak kelestarian hutan. Tentunya ini akan dapat mengancam kelangsungan kehidupan di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang umumnya memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan air tawar. Keberadaan hutan memiliki fungsi penting untuk dapat menjaga fungsi tata air dan menjamin ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Bintan yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Selain itu kehilangan hutan akibat pemangkasan lahan yang umumnya berbukit untuk permukiman perkotaan juga mengakibatkan meluasnya kawasan rawan kejadian bencana tanah longsor.

b. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pencegahan pencemaran darat, perairan dan laut juga menjadi isu lingkungan yang menjadi prioritas. Hal ini terkait dengan berkembangnya aktivitas industri, pertambangan dan permukiman yang seringkali tidak dilengkapi dengan perencanaan dan instalasi pengolahan sampah dan limbah yang memadai. Sebagai akibatnya kondisi lingkungan menjadi semakin buruk karena perkembangan berbagai aktivitas tersebut. Dengan daya dukung lingkungan pulau kecil yang terbatas, maka pencemaran darat, perairan dan laut ini akan mengganggu keberlangsungan ekosistem termasuk juga aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bintan. Banyaknya aktifitas pembangunan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL juga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Selain itu, kurang optimalnya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan juga akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

c. Pengolahan Sampah

Sistem pengelolaan sampah dititik beratkan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Dalam implementasinya pengembangan sistem pengelolaan persampahan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, yang penanganannya diprioritaskan untuk daerah-daerah pusat kota yang belum mendapat pelayanan dan daerah permukiman baru. Pengolahan sampah yang dilakukan di TPA dengan cara sistem open dumping, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sistem lahan urug (sanitary land fill) yang dilengkapi sarana sistem drainase permukaan maupun bawah permukaan, sistem pembuangan gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi sampah dan sumur (pipa) pemantau leachate (cairan yang ditimbulkan oleh sampah), serta daur ulang. Selain itu sampah-sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik, kertas dan kaleng dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan sampah, yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan dari sampah yang telah dipisahkan menjadi bahan baku atau barang jadi.

d. Pencegahan Dan Pencemaran Air Baku

Pencemaran perairan dapat mengganggu ketersediaan air baku dan aktivitas perikanan budidaya air tawar, sedangkan pencemaran laut akan mengganggu keberlangsungan aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya laut. Kabupaten Bintan sangat mengandalkan sumber air permukaan sebagai sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk air minum. Alternatif lain pemenuhan kebutuhan air minum dapat dilakukan dengan membuat bak-bak penampung air hujan yang dikelola secara individu, berupa sumur penampungan air hujan yang dibuat di halaman rumah dengan menggunakan material yang lulus air dan tahan longsor, serta harus bebas dari kontaminasi atau pencemaran limbah.

SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Bintan selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut di perbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2019 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu-isu strategis organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja
- Lain-lain yang dianggap

PENETAPAN & PERENCANAAN KINERJA

**“Terwujudnya Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pencapaian Bintan gemilang 2025”
(Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan)**

Pencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 Memasuki tahun 2019 dalam catatan strategis perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Bintan memasuki tahap ketiga dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005-2025 yaitu BINTAN GEMILANG 2025” Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan Pariwisata dan Kebudayaan. Yaitu membangun manusia secara utuh sehingga mencapai derajat sejahtera lahir maupun batin. Di tahun 2019 dibawah kepemimpinan Bupati Bintan memasuki tahun keempat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) tahun 2016-2021. Tentu saja dalam mencapai seluruh perencanaan yang mengakomodir seluruh elemen - elemen di Kabupaten Bintan guna mewujudkan visi Pemerintah

VISI

“Terwujudnya Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pencapaian bintang gemilang 2025”

(Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan)

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita - cita dan harapan bersama dengan tekad melakukan sejumlah perubahan - perubahan mendasar untuk mempersiapkan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Bintan pada periode 2016-2021 guna menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintan Gemilang pada 2025.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah permasalahan pembangunan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis dirumuskan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pencapaian bintang gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan)”

Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut :

Madani :

1. Masyarakat yang beradab dan agamis;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
3. Masyarakat yang demokratis;
4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. Program-program pembangunan berbasis masyarakat

Madani merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi yang hampa udara *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.

1. Sejahtera :

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Daya beli

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya.

Bintan Gemilang 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang:

1. Kelautan
2. Pariwisata
3. Kebudayaan

Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju” gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai core dan sekaligus sebagai *driver activity*. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh

hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

MISI

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Bintan yang pada dasarnya mencakup permasalahan tantangan peluang dan ancaman maka dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan 8 (Delapan) misi pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2016 - 2021 sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen perjanjian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja/ perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 serta merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 maka Indikator Kinerja Utama yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Bupati Bintan dengan Masyarakat Kabupaten Bintan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi juga mengalami perubahan.

Tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-1

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KNERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perizinan serta peningkatan pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	≥ 5%
	Realisasi Investasi PMA/PMDN	1.551 juta USD
Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan dan macanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	780.000 Wisatawan
Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	≥70%
Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transpotasi serta kapasitas fungsi sanitasi air bersih/minum	Persentase tingkat kemantapan jalan(mantap sempurna)	52,064%
Terhubungnya aktivitas antar pulau	Jumlah pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transpotasi	10 Pulau
Meningkatnya profesionalitas aparatur akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Reformasi Biroksasi	42 Point
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	30%
Meningkatnya kualitas daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	64,0%
Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	8 Peraturan
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	≥70
	Persentase penduduk miskin	<65%
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	
Meningkatnya peran generasi muda dan prestasi olahraga	Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif	60%

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	100%
Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Hasil pengukuran indeks kualitas air	58%
	Hasil Pengukuran indeks kualitas udara	1 Point

AKUNTABILITAS KINERJA

“Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan”

Kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberi amanah adalah akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Bintan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban membuat sajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bintan.

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan menghitung menggunakan dua jenis rumus dalam menghitung realisasi kinerja yaitu:

Semakin tinggi realisasi capaian kinerja semakin baik

Capaian Kinerja = (Realisasi / Target) x 100%

Semakin tinggi realisasi capaian kinerja semakin buruk

Capaian Kinerja = ((2 x target) – realisasi)/target x 100%

Untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dapat dilihat dari table berikut:

Table 3-1

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Relisasi Kinerja
Lebih besar sama dengan 90,1	Sangat Tinggi
75,1 sampai dengan 90	Tinggi
65,1 sampai dengan 75	Sedang
50,1 sampai dengan 65	Rendah
Lebih kecil dari 50	Sangat Rendah

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kabupaten Bintang Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2019 dengan realisasinya Tingkat capaian kinerja Kabupaten Bintang Tahun 2019.

Capaian Indikator sasaran terhadap Indikator Kinerja utama (IKU) Kabupaten Bintang yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja Kabupaten 2019 cukup variatif ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentase capaian sangat rendah.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bintang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021 Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintang tahun 2016-2021 berjumlah 15 (lima belas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Bintang.

Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membanding antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Sasaran Strategis 1

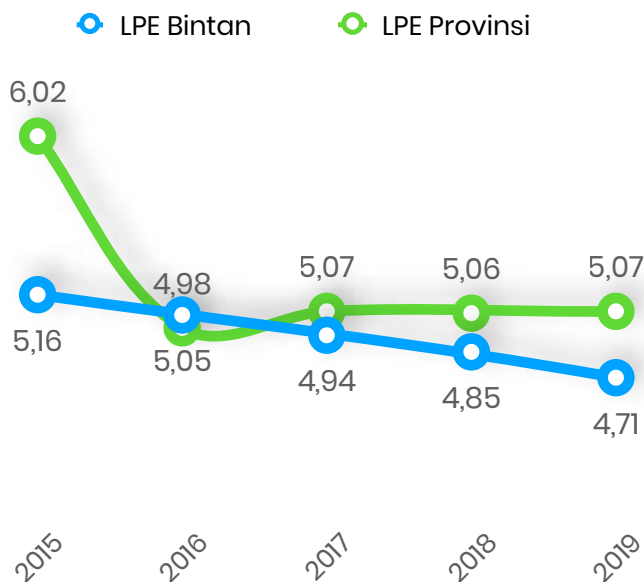
Meningkatnya Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan serta Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi	≥5%	4,85%	4,71%	94,20%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Beberapa indikator makro pencapaian pembangunan ekonomi



adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi. Kondisi perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2019 berdampak kepada kondisi ekonomi nasional maupun juga daerah.

Secara umum gambaran kondisi ekonomi domestik sejumlah tantangan dihadapi oleh pemerintah, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, membesarnya sektor informal, posisi wait and see investor, sampai dengan tidak tercapainya pendapatan dari sektor perpajakan secara nasional. Hal ini ditambah lagi dengan kondisi dari eksternal, sejumlah faktor ikut berdampak pada ekonomi Indonesia di tahun 2019, seperti eskalasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, penurunan

permintaan serta stagnasi harga komoditas dunia, Brexit, ketegangan dan konflik politik di sejumlah kawasan, dan krisis ekonomi di sejumlah negara Amerika Latin. Adanya kebijakan fiskal dan moneter Indonesia di tengah tren perlambatan ekonomi global menjadi salah satu dampak bagi daerah terutama proyeksi perubahan ekonomi diawal tahun serta koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi ditahun 2019 mengikuti perkembangan global. Hal ini berdampak bagi penganggaran dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah terutama capaian-capaian strategis jangka menengah dan selama setahun penyelenggaraan kinerja.

Data bahwa kinerja ekonomi nasional yang juga mengalami perlambatan sepanjang tahun 2019 secara bersamaan terjadi dengan kondisi perekonomian di daerah. Pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Bintan terutamanya pertumbuhan ekonomi tumbuh melambat 4,71% di tahun 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 4,85%.

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi-PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Didalam penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan maka PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2019 atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp,21,03 trilyun,- meningkat dari tahun 2018 yaitu Rp,19,59 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2019 pada 14 sektor lapangan usaha mengalami peningkatan, sedangkan 3 lainnya tumbuh lambat dan menurun hal ini dipengaruhi daripada sisi permintaan maupun juga ketersediaan. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yaitu Industri, Pariwisata dan Pertanian,

adapun uraian perkembangan daripada PDRB ADHB Kabupaten Bintan tahun 2019 sebagai berikut:

Table 3.3

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2018-2019

Lapangan Usaha	Tahun	
	2018	2019
SEKTOR PRIMER	1.907,06	1.851,52
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	838,95	865,85
Pertambangan dan Penggalian	1.068,11	985,67
SEKTOR SEKUNDER	8.162,57	8.655,85
Industri Pengolahan	5.356,75	5.590,14
Pengadaan Listrik dan Gas	19,91	20,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,71	8,41
Konstruksi	2.777,2	3.037
SEKTOR TERSIER	3.816,88	4.029,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.332,79	1.405,95
Transportasi dan Pergudangan	316,71	335,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	779,86	824,89
Informasi dan Komunikasi	205,39	214,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	248,36	261,27
Real Estate	167,18	175,55
Jasa Perusahaan	0,14	0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342,13	367,23
Jasa Pendidikan	261,89	273,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,20	145,73
Jasa lainnya	25,23	26,13
PDRB ADHK	13,886,11	14,540,09

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Table 3.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah),
Tahun 2018-2019

Lapangan Usaha	Tahun	
	2018	2019
SEKTOR PRIMER	2.545,08	2.555,93
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.231,35	1.314,96
Pertambangan dan Penggalian	1.313,73	1.240,97
SEKTOR SEKUNDER	7.681,44	8.356,36

Industri Pengolahan	7.657,43	8.331,31
Pengadaan Listrik dan Gas	24,01	25,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,43	12,20
Konstruksi	4.067,02	4.652,21
SEKTOR TERSIER	2.243,4	2.453,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.798,19	1.967,03
Transportasi dan Pergudangan	445,21	486,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.164,88	1.244,82
Informasi dan Komunikasi	226,17	245,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	321,86	340,64
Real Estate	216,52	229,94
Jasa Perusahaan	0,17	173,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	536,71	582,19
Jasa Pendidikan	368,23	389,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181,28	202,20
Jasa lainnya	33,65	35,58
PDRB ADHB	19,597,84	21,301,05

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Peningkatan dari PDRB ADHB Kabupaten Bintan pada tahun 2019 diikuti dengan PDRB ADHK, Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan maka PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2019 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 diestimasi sebesar Rp,14,54 trilyun,- meningkat dari tahun 2018 yaitu Rp,13,88 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha. Adapun kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2019 pada 14 sektor lapangan usaha mengalami peningkatan, sedangkan 3 lainnya mengalami penurunan dipengaruhi sisi permintaan maupun juga ketersediaan. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bintan didalam perkembangan kondisi ekonomi makro disikapi dengan pelaksanaan kerangka ekonomi makro daerah secara terpadu dan terintegrasi baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan iklim dunia usaha serta investasi berjalan sesuai dengan koridor yang telah direncanakan.

Adapun untuk 5 (lima) besar sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB Bintan pada Tahun 2019 meliputi lapangan usaha pada sektor Industri Pengolahan sebesar 38,45%, sektor konstruksi 20,89%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 96,7%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,78%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,67%, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3-4

Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2018-2019

Lapangan Usaha	Tahun	
	2018	2019
SEKTOR PRIMER		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,04	5,95
Pertambangan dan Penggalian	7,69	6,78
SEKTOR SEKUNDER		
Industri Pengolahan	38,58	38,45
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06
Konstruksi	20,00	20,89
SEKTOR TERSIER		
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,60	9,67
Transportasi dan Pergudangan	2,28	2,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,62	5,67
Informasi dan Komunikasi	1,48	1,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,80
Real Estate	1,20	1,21
Jasa Perusahaan	0,0010	0,0010
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	2,53
Jasa Pendidikan	1,89	1,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	1,00
Jasa lainnya	0,18	0,18
PDRB ADHK	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan, PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010, Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Bintan mampu tumbuh 4,71 persen lebih lambat dibanding pertumbuhan selama tahun 2018 yang sebesar 4,85 persen, Kondisi laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang juga mengindikasikan LPE di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 3.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Bintan, 2018–2019

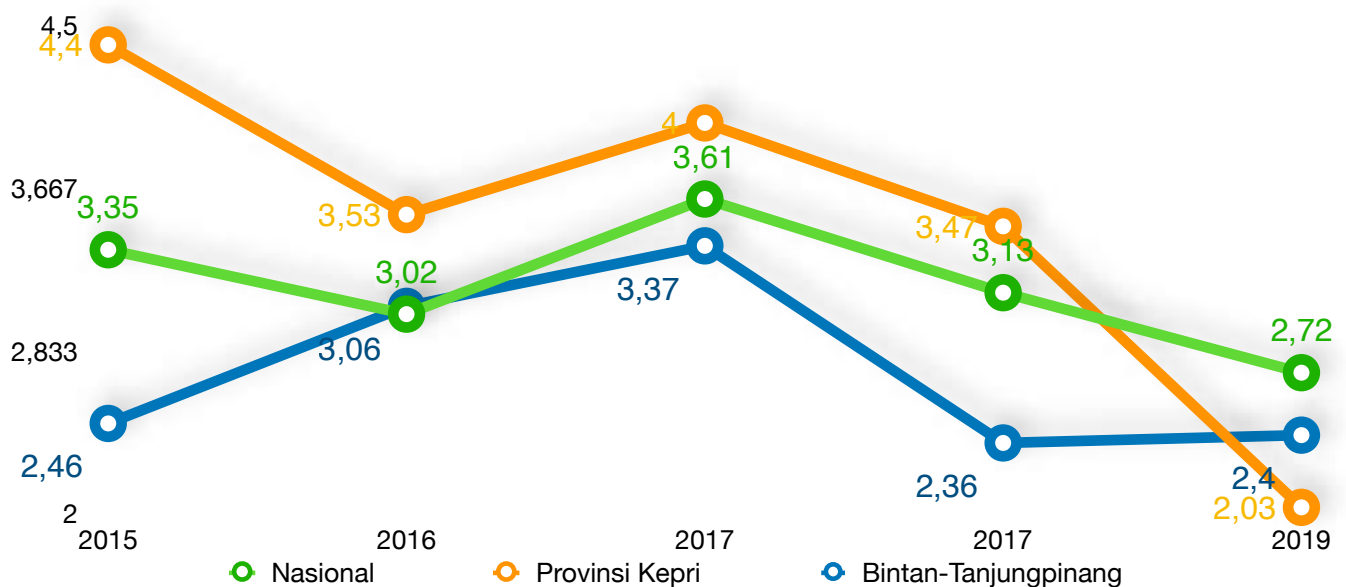
Lapangan Usaha	Tahun	
	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	3,21
Pertambangan dan Penggalian	-19,97	-7,72
Industri Pengolahan	4,89	4,36
Pengadaan Listrik dan Gas	- 0,43	1,96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,97	1,36
Konstruksi	16,14	9,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,44	5,49
Transportasi dan Pergudangan	3,67	5,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,29	5,77
Informasi dan Komunikasi	5,45	4,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,59	5,2
Real Estate	5,37	5,01
Jasa Perusahaan	1,22	1,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,56	7,34
Jasa Pendidikan	2,68	4,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,59	6,22
Jasa lainnya	4,57	3,56
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK	4,85	4,71

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018. Pada tahun 2019 LPE Kabupaten Bintan adalah 4,71% melambat dari tahun 2018 yang berada pada angka 4,85%. Perlambatan dari LPE di Kabupten Bintan pada tahun 2019 disinyalir sebagai imbas dari pemulihan ekonomi global yang lebih baik dibandingkan perkiraan sebelumnya, dampak pemulihan ekonomi dunia ini menyebabkan volume perdagangan dunia meningkat, yang selanjutnya mendorong peningkatan harga komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peningkatan ekspor komoditas serta akselerasi investasi baik dalam maupun luar negeri.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK).

Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kepri dan Bintan - Tanjung Pinang pada Tahun 2015-2019



Sumber: diolah dari data BPS Kepri dan BPS Bintan, Tahun 2020

Table 3.6
Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Bintan
(berdasarkan IHK Kota Tanjungpinang) Tahun 2018-2019

Kelompok Pengeluaran	Tahun	
	2018	2019
Bahan Makanan	2,55%	4,73%
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,90%	1,76%
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,06%	0,71%
Sandang	2,68%	3,36%
Kesehatan	0,49%	1,84%
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3,02%	2,88%
Transport, Kominikasi dan Jasa Keuangan	3,79%	1,82%
UMUM	2,35	2,40

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2019

IHK Kabupaten Bintan hingga saat ini masih mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang dimana secara umum pada tahun 2019 IHK Kota Tanjungpinang mengalami sedikit kenaikan namun masih sangat terkendali dari tahun 2018 yaitu dari 2,36% naik sekitar 0,04 % menjadi 2,40%. Secara nasional untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tetap rendah terkendali pada level 2,72% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$, sedangkan secara tahunan IHK dikepri mengalami infasi sebesar 2,03 persen (yoy), inflasi Bintan yang mengikuti dari perkembangan Tanjungpinang 2019 terkendali capaian Inflasi sebesar 2,40 persen (Year on year) dipicu oleh kelompok bahan makanan sebesar 4,01 % (Year on year) dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,81 persen (month to month) terutama tarif angkutan udara.

Pengendalian dari angka inflasi ini merupakan salah satu bukti nyata kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Penguatan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan terus dilanjutkan untuk pengendalian harga.

Secara khusus Kabupaten Bintan dalam koordinasi inflasi daerah melibatkan lintas sektor didalam Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk menjaga agar inflasi terus menurun dan terkendali dalam sasaran dipengaruhi oleh makin terjangkau ekspektasi inflasi dan terjaganya kestabilan selaras dengan arahan Pemerintah Pusat untuk mengimplementasikan strategi 4K dalam menekan inflasi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk dapat menjaga dan mendukung capaian sasaran inflasi nasional sebesar $3 \pm 1\%$ ditahun ini.

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Realisasi Investasi PMA/PMDN	1.551	78.656,34	1.891,72	121,97%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Investasi PMA yang masuk pada tahun 2019 sebesar 1.784.117.778 USD dan PMDN sebesar Rp. 1.506.406.127.701,-, (107.600.438 USD), kedua nilai ini memang lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun lalu namun rencana investasi tahun 2018 hanya terealisasi 4,07% sehingga masih banyak rencana investasi pada tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya terealisasi. Sedangkan untuk realisasi investasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2018, hal ini mungkin dikarenakan realisasi pada tahun sebelumnya baru terealisasi pada tahun ini. Bahkan untuk Realisasi PMA lebih besar dari rencananya, hal ini mungkin dikarenakan rencana pada tahun sebelumnya yang cukup besar baru terealisasi pada tahun 2019.

Tabel 3.7

Perkembangan Investasi PMS/PMDN di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019

Tahun	Status	Jumlah	Investasi (US\$/Rp)	
			Rencana	Realisasi
2015	PMA	199	1.427	1.251
	PMDN	34	2.436.949.956.566	1.457.589.688.831
2016	PMA	199	1.320.838	962.049
	PMDN	61	702.946.000.000	475.257.923.685
2017	PMA	210	2.125.653.539	712.194.039
	PMDN	68	8.893.550.760.000	462.654.981.185
2018	PMA	215	77.803.709.075	696.859.452
	PMDN	78	11.936.765.760.000	485.993.431.680
2019	PMA	118	1.784.117.778	4.454.927.671
	PMDN	82	1.506.406.127.701	1.240.880.125.339

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Bintan, 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 mengamanahkan kepada seluruh daerah untuk melaksanakan pelayanan perijinan melalui sistim Online Single Submission (OSS). DPMPTSP telah mulai melakukan pelayanan perizinan secara online sejak pertengahan tahun 2018. Kelemahan yang dihadapi setelah dilakukan penerapan OSS adalah rencana investasi investor tidak seluruhnya terdata di dalam aplikasi sistim OSS. Hal ini berefek pada kesenjangan rencana investasi pada tahun tahun sebelum diterapkannya aplikasi pelayanan perizinan melalui OSS.

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di daerah dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk membuka dan mendorong peluang investasi di Kabupaten Bintan dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat tepat jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna hal ini dilakukan melalui:

1. Penumbuhan Iklim ekonomi dan peningkatan investasi, Semua kebijakan pembangunan daerah yang sedang dan atau akan diselenggarakan harus mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi. Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan peningkatan investasi terlebih dahulu harus memiliki wawasan penumbuhan iklim usaha yang kondusif artinya program pembangunan daerah harus memiliki kontribusi positif terhadap tumbuhnya penanaman modal (investasi)
2. Kebijakan diarahkan terlebih dahulu mengatasi masalah kesempatan kerja dan peluang usaha dengan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan iklim usaha investasi di berbagai sektor maka percepatan pertumbuhan ekonomi akan berjalan semakin berkembang dan ini akan berpengaruh kepada masyarakat juga dengan terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja yang sejalan dengan asas ekonomi kerakyatan
3. Pengembangan wilayah yang strategis dan berpotensi bagi penciptaan ekonomi juga perlu diwujudkan dalam kebijakan ini artinya potensi daerah Kabupaten Bintan harus dapat dimanfaatkan dipersiapkan untuk mencari komoditas dan produk unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan tersedianya peluang usaha dan kesempatan kerja melalui promosi dan investasi serta dapat membangun citra Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investor yang menarik aman dan nyaman
4. Peningkatan Arus Informasi dan Pelayanan Kepada Pelaku Usaha/Investor dengan potensi sumber daya daerah
5. Strategi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan pembinaan terhadap peningkatan kualitas pelayanan pelaku usaha investor dan masyarakat secara efektif dan efisien dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan aktifitas melalui penyederhanaan sistem dan prosedur melalui pelayanan terpadu satu pintu
6. Kebijakan peningkatan Kualitas Aparatur Sarana dan Prasarana sangat berperan dalam rangka penciptaan suasana yang kondusif untuk bekerja bagi jajaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja mewujudkan misi.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2018	%
Jumlah Kunjungan Wisatawan	780.000	1.063.458	1.094.442	140,31%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan melebihi target yang ditetapkan yakni 780.000 kunjungan dan mengalami kenaikan dari tahun 2018. Tahun 2019, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 348.761 kunjungan sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 745.681 kunjungan dengan total kunjungan wisatawan sebesar 1.094.442 kunjungan. Sedangkan pada tahun 2018 kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 420.749 kunjungan, wisatawan mancanegara sebesar 642.709 kunjungan, total kunjungan wisatawan sebesar 1.063.458 kunjungan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan BRC dan Imigrasi, terlihat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Tiongkok merupakan negara terbanyak asal turis yang berkunjung ke Kabupaten Bintan, disusul negara Singapura dan India pada tahun 2019 lebih kurang seperempat dari total wisman yang berkunjung ke Kabupaten Bintan adalah dari negara Tiongkok. Untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan, maka perlu diadakan events pada bulan bulan dengan kunjungan yang relatif rendah. Jumlah kunjungan saja tidak cukup, revisit dari wisman yang telah berkunjung juga harus ditingkatkan. Karena hal ini menunjukkan berhasil atau tidaknya pengelola pariwisata di suatu daerah.

Tabel 3.8

Kunjungan Wisata Tahun 2016-2018

Wisatawan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Mancanegara	360.321	480.544	642.709	745.681
Nusantara	315.713	417.660	420.749	348.761
Total	676.034	898.204	1.063.458	1.094.442

Sumber: BRC, Imigrasi diolah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan 2019

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator jumlah wisatawan adalah makin bergawamnya atraksi wisata yang ada di Kabupaten Bintan. Untuk merepospon hal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan bersama stakeholder pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Semakin banyak penyelenggaraan event-event yang dilakukan oleh para pelaku wisata di kabupaten Bintan akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berkunjung. Atraksi wisata dilakukan dengan menyelenggarakan event-event kepariwisataan dan juga dengan cara membangun destinasi wisata baru. Kedua hal tersebut juga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dengan dukungan

yang besar dari Pemerintah Pusat maupun Stakeholder Kepariwisataa serta dari masyarakat Kabupaten Bintan. Event - event Kepariwisataa yang diselenggarakan di Bintan sepanjang tahun 2019 antara lain:

1. Tour de Bintan
2. Iron Man
3. Bintan Triathlon
4. Sail Bintan
5. Bintan Culture
6. Festival Keter Bintan
7. Gowes Bintan
8. Penerimaan Wisatawan Perdana

Selain Event -event Kepariwisataa, Kabupaten Bintan juga memiliki sejumlah Destinasi Wisata menarik yang dapat dikunjungi, berikut ini adalah daftarnya.

Table 3.9

Destinasi Wisata Kabupaten Bintan berdasarak Kecamatan Tahun 2019

Lokasi	Objek Wisata
I. WISATA ALAM	
KECAMATAN BINTAN UTARA	
Tanjung Uban Utara	Pantai Sakera
Tanjung Uban Utara	Pantai Dinda
KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	
Kuala Sempang	Wisata Mangrove Sei Lapan
Kuala Sempang	Wisata Bukit Ice Cream
Kuala Sempang	Wisata Gurun
Desa Busung	Telaga Biru
Desa Busung	Pantai Datuk Diraja
KECAMATAN TELUK SEBONG	
Sebong Lagoi, Lagoi	Lagoi Bay
Desa Pengudang	Wisata Alam Mangrove Pengudang
Desa Sei Kecil	Wisata Mangrove Sungai Kecil
Desa Berakit	Wisata Mancing Berakit
Desa Berakit	Wisata Mangrove Kampung Panglong
Teluk Sebong	Pantai Senggiling
Desa Pengudang	Batu Junjung

KECAMATAN GUNUNG KIJANG	
Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Pantai Trikora, Wisata Alam
Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Pulau Beralas Pasir ,Wisata Bahari *
Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Wisata Memancing Nemo Bintan
Malang Rapat Jl. Pantai Trikora Trikora KM 50	Kawasan Pariwisata Pantai Trikora KM. 50
Malang Rapat Jl. Pantai Trikora Trikora KM 52	Pantai Trikora Kawasan Pariwisata KM. 52
Desa Kawal	Pulau Nikoi *
Kawal	Wisata Mangrove Kawal
KECAMATAN TOAPAYA	
Toapaya	Bukit Zaitun
KECAMATAN TELUK BINTAN	
Teluk Bintan, Desa Bintan Buyu	Air Terjun Gunung Bintan, Wisata Alam
Teluk Bintan, Desa Penaga	Wisata Mangrove Desa Penaga
Teluk Bintan	Gunung Bintan, Wisata Alam
KECAMATAN BINTAN PESISIR	
Pulau Numbing	Pulau Numbing, Wisata Bahari & Alam
Pulau Suka - Mapur	Pulau Suka/ Joyo *
Pulau Pangkil Kelong	Pulau Pangkil, Wisata Bahari & Alam
Pulau Kelong	Pulau Poto, Wisata Bahari & Alam
Pulau Kelong	Pulau Hantu, Wisata Bahari & Alam
Air Gelubi Kelong	Pulau Cempedak *
KECAMATAN TEMBELAN	
Tambelan	Teluk Abik, Wisata Pantai
Tambelan	Teluk Penepat, Wisata Pantai
Tambelan	Pulau Bungin, Wisata Pantai
II. WISATA BUATAN	
KECAMATAN BINTAN UTARA	
Tanjung Uban Utara	Desa Wisata Tenun Songket
Tanjung Uban Utara	City Park Kampung Bugis Wisata Bahari
Jl. H. Raja Daud, No.1 Tanjung Uban	Masjid Raya Baitul Makmur
KECAMATAN SERI KUALA LOBAM	
Kuala Sempang	Trek Sepeda Jalur Batang Nibung
KECAMATAN TELUK SEBONG	

Sebong Lagoi, Lagoi	Treasure Bay *
Sebong Lagoi, Lagoi	Taman Safari dan Eko Fam Lagoi
Sebong Lagoi, Lagoi	Konservasi Telur Penyu Kampung Baru
Sebong Pereh	Taman Rekreasi
Sebong Pereh	Kampung Jamur Tiram
Desa Berakit	Wisata Mancing Berakit
E Kang Anculai	Desa Wisata E Kang
KECAMATAN GUNUNG KIJANG	
Kp Jeropet Kelurahan Kawal	Pasar Betuah
KECAMATAN TOAPAYA	
Toapaya Asri	Agrowisata Holtikultura (Buah Salak)
Toapaya	Bukit Zaitun
KECAMATAN TELUK BINTAN	
Teluk Bintan, Desa Poyotomo	Pemancingan Poyotomo
KECAMATAN BINTAN TIMUR	
Kijang Kota	Taman Rekreasi Taman Kota Kijang
Kijang Kota	Mini Zoo Kijang
Kijang Kota	Relief Antam
Kijang Kota	Kijang City Walk
Sungai Enam Laut	Wisata Kuliner Otak-Otak
III. WISATA BUDAYA	
KECAMATAN TELUK SEBONG	
Desa Berakit	Kampung Suku Laut
KECAMATAN GUNUNG KIJANG	
Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Museum Bahari Bintan
Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	Perahu Jong
Kawal Darat	Bukit Kerang, Situs Cagar Budaya
Desa Berakit	Kampung Suku Laut
KECAMATAN TELUK BINTAN	
Desa Bintan Buyu	Makam Bukit Batu
KECAMATAN TEMBELAN	
Tambelan	Makam Sultan Abdurrahman Batu Lepuk

IV. WISATA BELANJA**KECAMATAN TELUK SEBONG**

Sebong Lagoi, Lagoi

Lagoi Bay

V. WISATA KULINER**KECAMATAN TELUK SEBONG**

Sebong Lagoi, Lagoi

Lagoi Bay

KECAMATAN BINTAN TIMUR

Sungai Enam Laut

Wisata Kuliner Otak-Otak

VI. WISATA PENDIDIKAN**KECAMATAN TELUK SEBONG**

Sebong Lagoi, Lagoi

Bintan Sahid Tourism Institute

VII. WISATA PERTANIAN

Toapaya Asri

Agrowisata Holtikultura

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bintan Tahun 2019

Guna meningkatkan destinasi Wisata, Kabupaten Bintan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mengembangkan Desa Wisata. Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.

Pemberdayaan Masyarakat dengan mengembangkan Desa wisata merupakan salah satu Skala Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dalam membangun Pariwisata berbasis Masyarakat, jumlah keseluruhan yang akan dibentuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bintan hingga tahun 2021 mendatang sebanyak 8 Desa Wisata. Tahun 2019 ini dari target 5 desa wisata yang dikembangkan, realisasinya telah mencapai 6 Desa Wisata. Adapun rincian Desa Wisata yang dikembangkan tahun 2019 sebagai berikut :

Table 3.10

Desa Wisata Kabupaten Bintan Tahun 2019

Nama Desa Wisata	Jenis Wisata	Kecamatan
Desa Wisata Pengudang	Mangrove Pengudang	Teluk Sebong
Desa Wisata Berakit	Wisata Mancing, Budaya	Teluk Sebong
Desa Wisata E kang	Wisata Taman Rekreasi	Teluk Sebong
Desa Wisata Mapur	Wisata Bahari	Bintan Pesisir

Desa Wisata Toapaya Selatan	Wisata Alam	Toapaya
Desa Seborg Lagoi	Wisata Alam	Teluk Seborg
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2019		

Sejumlah Program yang mendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan adalah

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terdiri dari Pengembangan Musium Bahari Bintan dan Pemeliharaan Cagar Budaya Bintan;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari Even Tracking Bintan Cemtaras, Penataan Kawasan Pariwisata, Amnitas Pariwisata;
3. Program Pengelolaan Keberagaman Budaya terdiri dari Pengembangan dan Seni Budaya Bintan, Pentas Kesenian Rakyat, Festival Tari dan Gebyar Budaya Bintan;
4. Program Pengembangan Kemitraan, Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove, Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner, Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata, Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan, Pelatihan Pemandu Wisata Alam/Trekking, Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/Rumah Wisata.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan dalam PDRB	≥7%	8,77	8,8	125,71%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup melimpah Secara historis budaya maritim sebagai bangsa bahari sangat kuat diwariskan sejak zaman nenek moyang oleh karena itu arah pembangunan ke depan perlu menitikberatkan pada pengoptimalan potensi kelautan sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa mengingat potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia 73 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Pembangunan berbasis kelautan selain dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan juga dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan dan kelompok masyarakat pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian,

Kabupaten Bintan sendiri memiliki luas wilayah mencapai 88.038,54 Km², namun luas daratannya hanya 2,21%, 1,946,13 Km² sisanya 86,092,41 Km² adalah laut, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km²,

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil, Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum perpendukun sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan, sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan

pertanian khususnya usaha perkebunan. Potensi kelautan yang sangat besar ini jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya.

Pada tahun 2019 Kabupaten Bintan berhasil meningkatkan Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan dalam PDRB menjadi 8,8 persen dari 8,77 persen di tahun 2018 dari target diatas 7 persen yang berarti 125,71 persen capaian kinerja.

Tabel 3.10

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Tahun 2018-2019

Lapangan Usaha	Tahun	
	2018	2019
SEKTOR PRIMER	1.907,06	1.851,52
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	838,95	865,85
Pertambangan dan Penggalian	1.068,11	985,67
SEKTOR SEKUNDER	8.162,57	8.655,85
Industri Pengolahan	5.356,75	5.590,14
Pengadaan Listrik dan Gas	19,91	20,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,71	8,41
Konstruksi	2.777,2	3.037
SEKTOR TERSIER	3.816,88	4.029,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.332,79	1.405,95
Transportasi dan Pergudangan	316,71	335,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	779,86	824,89
Informasi dan Komunikasi	205,39	214,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	248,36	261,27
Real Estate	167,18	175,55
Jasa Perusahaan	0,14	0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342,13	367,23
Jasa Pendidikan	261,89	273,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,20	145,73
Jasa lainnya	25,23	26,13
PDRB ADHK	13.886,11	14.540,09

BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan.

Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun international, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96,268,00 Km², Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau - pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan. Tahun 2019, Kabupaten Bintan telah berhasil memproduksi 2.022 Ton Perikanan Budidaya dari target 2.011, 96 Ton, sedangkan dari produksi perikanan tangkap dihasilkan 55.604 Ton dari target 55.536 Ton.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari program - program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, antara lain :

1. Pogram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, terdiri dari Pelayanan Usaha Perikatan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Perikatan dan Forum Peningkatan Komunikasi Ikan Kabupaten Bintan.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari Pengembemban Usaha BUdidaya Perikanan Air Tawar dan Laut dan Peningkatan Produksi Usaha Budidaya Perikanan.
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, terdiri dari Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil.
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari Monev Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan, Sosialisasi dan Sertifikasi Cbib (Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pengadaan Vitamin, obat dan alat-alat kesehatan lingkungan.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan dan Prasarana Transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi air

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna)	52,064%	52,057%	54,170%	104,045%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) adalah Kondisi ruas jalan sedang sampai dengan baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas. Jalan yang merupakan

prasarana transportasi darat yang harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Kerusakan jalan lebih cepat dari umur rencana sering terjadi khususnya di jalan jalan arteri. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu diperlukan kondisi mantap jalan agar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal selama umur rencana jalan yang telah ditetapkan.

Kabupaten Bintan pada tahun 2019 menargetkan Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) pada angka 52,06 persen terealisasi sebesar 54,170 persen dengan capaian Kinerja 104,045%.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, bertujuan menyediakan prasarana jalan, menambah kapasitas jalan dan jembatan serta memperlancar arus transportasi darat. Pada tahun 2019 ditargetkan panjang jalan yang di aspal 5 Km, sedangkan yang terealisasi pada tahun 2018 panjang aspal yang dibangun dan ditingkatkan 8,547 Km.

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, bertujuan memelihara jalan yang dapat memperpanjang umur jalan dan memperlancar arus transportasi pada tahun 2019 ditargetkan 242,93 Km jalan aspal yang dipelihara sedangkan realisasi pemeliharaan 256,07 Km.

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar Pulau Untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan Transportasi	10	10	11	110,00%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Kabupaten Bintan terdiri dari 240 (dua ratus empat puluh) buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah tersebut 39 buah pulau merupakan pulau berpenghuni. Diawal Renstra jumlah pulau berpenghuni yang dilayani angkutan laut sebanyak 8 (delapan) pulau dan di akhir periode Renstra jumlah pulau berpenghuni yang dilayani angkutan laut ditargetkan menjadi 11 pulau dari jumlah pulau berpenghuni di Kabupaten Bintan.

Tahun 2019 ditargetkan persentase pulau berpenghuni yang dilayani angkutan laut sebesar 10 pulau pulau dari 39 pulau berpenghuni di Kabupaten Bintan. Pencapaian pada tahun 2019 adalah 11 pulau berpenghuni yang dilayani angkutan laut. Adapun pulau - pulau berpenghuni yang dilayani angkutan laut adalah:

1. Pulau Bintan
2. Pulau Mapur
3. Pulau Numbing
4. Pulau Pangkil
5. Pulau Mantang

6. PulauKelong
7. Pulau Tambelan
8. Pulau Air Glubi
9. PulauDendum
10. PulauTelang
11. Pulau Gin Besar

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Profesionalitas Aparatur akuntabilitas kinerja Pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi	42 Point	n/a	n/a	n/a

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar komprehensif dan sistematis sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Guna mempermudah memahami tentang Reformasi Birokrasi dibagi kedalam 8 (delapan) area yaitu:

1. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas efektif efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan

6. Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Untuk mengukur nilai realisasi Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai alat pengukurnya. Saat ini Kementerian PAN dan RB telah mengembangkan aplikasi berbasis web untuk memudahkan unit - unit Kerja Pemerintah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2019, Bepelitbang Kabupaten Bintan telah menyelesaikan penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi. Dan pada tahun 2020, Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan No. 204/III/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

SASARAN STRATEGIS 8

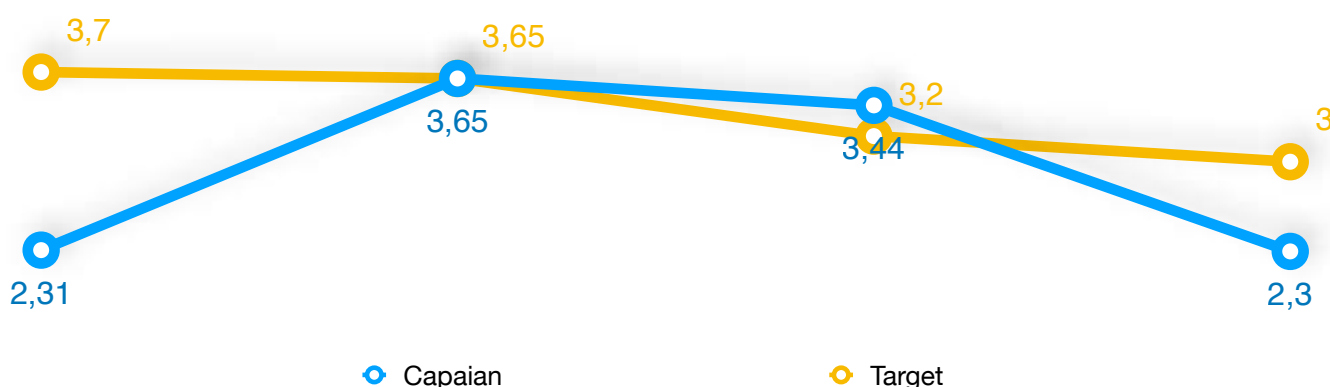
Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Total Fertility Rate (TFR)	3,00%	3,44%	2,30%	123,33%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Penduduk Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1 (Satu) persen berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Bintan tahun 2019 berpenduduk sebesar 155.456 jiwa. Perbandingan persentase antara laki-laki dengan perempuan sebesar 51:49 persen (%) dengan jumlah laki-laki sebesar 7.9880 jiwa berbanding jumlah perempuan 7.5576 jiwa. Sedangkan untuk Sex Ratio pada tahun 2019 di Kabupaten Bintan sebesar 106 artinya dalam 106 laki-laki terdapat 100 perempuan Kelompok umur 35-39 masih mendominasi dengan 73 ribu jiwa laki-laki dan 77 ribu jiwa perempuan. Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bintan sebesar 2,3% rata-rata jumlah anak per wanita pada masa reproduksinya.



Tabel 3.11
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bintan

	2016	2017	2018	2019
Target	3,7	3,65	3,2	3
Realisasi	2,31	3,65	3,44	2,30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Bahwa Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bintan menurun signifikan dari tahun 2018 yang berada pada angka 3,2 turun menjadi 2,30 pada tahun 2019 setelah mengalami kenaikan pada tahun 2017. Pencapaian dengan menahan laju pertumbuhan penduduk TFR di angka 2,30% ini merupakan hasil maksimal yang harus dipertahankan di tahun – tahun yang akan datang. Dukungan APBD Kabupaten Bintan dalam Bidang Pengendalian Penduduk tentunya harus ditingkatkan guna lebih menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan.

Melalui kegiatan pembangunan Balai Penyuluhan KB Pengadaan Sarana Pendataan dan Pengadaan Alat Peraga KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Bantuan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik), Pembinaan Kader KB dan Tenaga Penyuluh, Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pelaksanaan Program Kampung KB

telah memberikan pengaruh besar pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang secara tidak langsung mampu menekan TFR Angka Pertumbuhan Penduduk, kegiatan tersebut mampu memberikan komunikasi informasi dan edukasi sehingga membumikan program KKBPK baik ditengah masyarakat maupun hubungan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Capaian ini didukung dengan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Kualitas Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,4%	5,89%	8,01%	74,84%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bintan cenderung meningkat yaitu dari 104,117 menjadi 105,328, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya perpindahan penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja dari luar daerah ke Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan dan perpindahan penduduk ke Bintan karena tugas. Penambahan penduduk usia kerja diikuti dengan penambahan jumlah angkatan kerja, Jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan dari 84.010 orang menjadi 85.129 orang, melihat angka tersebut diasumsikan bahwa terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 3.12
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan Tahun 2018 – 2019

Indikator	Satuan	Tahun	
		2018	2019
Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	Ribu orang	104.117	105.328
Penduduk Angkatan Kerja	Ribu orang	84.010	85.129
Penduduk Bekerja (15 tahun keatas)	Ribu orang	77.837	79.592
Penganggur (Mencari Kerja)	Ribu orang	2.110	2.156
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	80,69	80,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,31	7,03
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen		93

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan

Besaran daripada tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bintan yang mencapai 93 persen dapat diindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja sekaligus menginterpretasikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bintan dalam urusan tenaga kerja. Berdasarkan hasil survei tenaga kerja (SAKERNAS) oleh Badan Busat Statistik pada 2018 terdapat 69,306 jiwa penduduk angkatan kerja dan

sekitar 91,92 persen diantaranya telah bekerja. Peningkatan baik daripada segi angkatan kerja yang bekerja disektor formal dari tahun 2018 hingga tahun 2019 menjadi titik perhatian pemerintah dengan menggandeng sektor swasta dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal maupun replikasi business model diikuti dengan penanaman modal bagi lingkungan lapapangan pekerjaan bagi masyarakat serta iklim usaha. Berkaitan dengan angka pencari kerjas serta tingkat pengangguran terbuka, polarisasi daripada pekerja sektor informal di era digital ini masih belum dapat seluruhnya teridentifikasi, ditambah lagi dengan pertumbuhan daripada peralihan dari usaha konvensional seperti usaha mikro yang lebih mengandalkan sistem elektronik dalam mekanisme pemasaran produk. Dalam perkembangannya hal ini masih perlu dijangkau didalam hal indikator pendataan daripada pemerintah. Hingga tahun 2019 persentase tingat kesempatan kerja di Kabupaten Bintan sebesar 93% ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Besaran tingkat kesempatan kerja daripada angkatan kerja yang selanjutnya dengan semakin tinggi TKK maka korelasinya adalah kondisi kesempatan kerja semakin tinggi. Kerja-kerja pemerintah Kabupaten Bintan dalam perluasan kesempatan kerja terus dilakukan, sebab pertumbuhan industri pengolahan, pariwisata, makanan dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja.

Untuk mempercepat penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan berbagai upaya melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan antara lain dengan melakukan Pelatihan – pelatihan dan Sertifikasi guna meningkatkan kemampuan para pencari kerja sehingga terciptanya tenaga kerja yang memiliki sertifikat dan kompetensi. Pelatihan – pelatihan yang telah dilakukan pada tahun 2019 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan adalah Pelatihan instalasi listrik yang diikuti sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja (Pelatihan Bahasa Asing/Inggris) yang diikuti sebanyak 20 (dua puluh) orang, Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) pelatihan ini diikuti sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat (Rigger) yang diikuti sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang.

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan juga berusaha melakukan Peningkatan Kapasitas Data Ketenagakerjaan karena data yang baik merupakan pondasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Agar keputusan yang diambil tersebut tepat sasaran maka data yang digunakan pun haruslah data yang baik. Penyusunan data ketenagakerjaan ini melibatkan 44 (empat puluh empat) orang petugas pendata yang tersebar di 51 (lima puluh satu) desa dan kelurahan di wiliyah Kabupaten Bintan. Penyebarluasan Informasi Pasar Tenaga Kerja yang memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan juga dipandang sangat penting untuk terus ditingkatkan kedepan. Pemerintah Kabupaten Bintan harus memanfaatkan Teknologi Informasi dalam menyebarluaskan informasi Pasar Tenaga Kerja untuk mempermudah pencari kerja mendapatkan informasi ketenagakerjaan. Penggunaan media sosial dalam menyebarluaskan informasi merupakan langkah terobosan yang tepat untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bintan.

SASARAN STRATEGIS 10:

Meningkatnya Kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan Budaya Daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	8	4	4	50,00%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Meningkatnya kelestarian nilai – nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan Budaya Melayu, Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa diperlukan suatu bentuk pelestarian akan nilai-nilai dan seni budaya melayu hal itu dilakukan agar tetap terjaganya nilai-nilai dan seni budaya melayu di Kabupaten Bintan.

Kepulauan Riau merupakan latar belakang sejarah seni dan budaya masyarakat Kabupaten Bintan. Berbicara tentang seni budaya, sejak zaman dahulu telah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan dan kesenian sebagai hasil perpaduan dari berbagai unsur telah mewujudkan kebudayaan dan kesenian tradisional yang beraneka ragam coraknya yang pada hakekatnya mencerminkan kesatuan secara esensial sebagai ungkapan kebudayaan dan kesenian Kabupaten Bintan

Peran Lembaga Adat Melayu salah satu titik tolak pariwisata melalui budaya melayu khususnya seni tari, berdasarkan fungsi nya LAM bersama Pemerintah Daerah merencanakan mengarahkan membudidayakan program pembangunan sesuai dengan tata nilai adat istiadat yang berlandaskan dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan keseimbangan serta ketertiban masyarakat LAM juga merupakan wakil fasilitator dan mediator adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah sebagai upaya dan pengembangan dan pelestarian kebudayaan melayu dengan dilakukan lokakarya dan integrasi sosial berbasis budaya diperoleh sejumlah informasi tentang upaya penguatan kohesi masyarakat adat sebagai dasar melalui wadah-wadah yang sudah tersedia Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya Pengembangan kebudayaan daerah dapat menjadi titik tolak perkembangan Kabupaten melalui pariwisata.

Guna melestarikan Kebudayaan Melayu Pemerintah Kabupaten Bintan juga menetapkan indikator jumlah Peraturan Yang Mendukung Kelestarian Nilai Seni Dan Budaya Melayu. Hal ini dimaksudkan agar seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan dan Masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya bahu membahu dalam upaya melestarikan Kebudayaan Melayu di Kabupaten Bintan. Indikator jumlah Peraturan Yang Mendukung Kelestarian Nilai Seni Dan Budaya Melayu tercapai sebesar 4 Peraturan dari target yang ditetapkan sebanyak 8 Peraturan. Adapun 4 peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dimana setiap hari jum'at ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diwajibkan menggunakan Baju Adat Melayu.
2. Peraturan Bupati Bintan Nomor 414/VIII/2019 Tentang Penetapan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bintan.
3. Peraturan Bupati Bintan Nomor 413/VIII/2019 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bintan.
4. Peraturan Bupati Bintan Nomor 301/V/2017 Tentang Penetapan Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Bintan.

Selain itu, dalam upaya melestarikan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan pada tahun 2019 telah melakukan pembinaan terhadap 41 sanggar seni dibidang seni budaya seni tari seni musik seni rupa/kriya seni teater makyon seni kompiang marawis silat Dangcong Gambus.

Table 3.13

Daftar Sanggar Seni Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Nama Sanggar	Lokasi	Budaya
1	Sanggar Joget Dangkong Melayu Serumpun Bersatu	Gunung Kijang	Seni Budaya
2	Sanggar Sang Nila	BintanTimur	Seni Tari
3	Sanggar Kreasi Guru	BintanTimur	Seni Tari/Musik
4	Sanggar Tuah Pusaka	BintanTimur	Seni Tari
5	Sanggar Sirih Delima	Bintan Timur	Kesamaan Fungsi
6	Sanggar Sri Bintan	BintanTimur	Seni Tari
7	Sanggar Sirih Junjung	BintanTimur	Seni Tari
8	Sanggar Tepak Sirih	Toapaya	Seni Tari
9	Sanggar Bintan Pelangi	Gunung Kijang	Seni Tari
10	Sanggar Kelana	Gunung Kijang	Seni Rupa/Kriya
11	Sanggar Kemilau	Sri Koala Lobam	Seni Tari
12	Sanggar Seni Teater Makyong Warisan	Bintan Timur	Seni Teater Makyong
13	Sanggar Bungsu Sakti	Mantang	Seni Teater Makyong
14	Sanggar Sri Penolak	Tambelan	Seni Tari
15	Sanggar Seni Bintan Penao	Teluk Bintan	Seni Tari
16	Sanggar Seni Sekapur Sirih	Bintan Utara	Seni Tari
17	Sanggar Tari Melayu Bertuah	Bintan Utara	Seni Tari
18	Sanggar Sinar Bintan Budaya	Bintan Utara	Kompiang/Marawis
19	Sanggar Warisan Bunda	Bintan Timur	Seni Teater
20	Sanggar Bujang Dara	Bintan Timur	Tari Kreasi
21	Sanggar Sri Bintan Buana	Sri Kuala Lobam	Seni Tari
22	Sanggar Mutiara Bintan	Sri Kuala Lobam	Seni Tari
23	Bunga Tanjung	Sri Kuala Lobam	Kesenian
24	Sanggar Cempaka Putih	Sri Kuala Lobam	Seni Tari
25	Sanggar Bintan Bertuah	Bintan Timur	Seni Tari
26	Sanggar Dang Merdu	Teluk Bintan	Seni Tari
27	Sanggar Bukit Siguntang	Teluk Bintan	Seni Tari
28	Sanggar Laksemana	Bintan Utara	Seni Tari
29	Sanggar Serampit	Bintan Timur	Seni Tari
30	Sanggar Gelora	Teluk Sebong	Seni Tari/Silat
31	Sanggar Langlang Buana	Teluk Sebong	Seni Tari
32	Sanggar Tari Pesona	Bintan Pesisir	Seni Tari
33	Sanggar Sekapur Sirih	Bintan Timur	Seni Tari
34	Lasqi	Bintan Utara	Seni Tari/Joged Dangkong
35	Madani Bintan	Toapaya	Seni
36	Karida Budaya	Gunung Kijang	Seni Tari/Musik
37	Sanggar Segak	Bintan Timur	Seni Musik
38	Kompas	Bintan Timur	Gambus
39	Sanggar Seloka Bertabuh	Mantang	Seni Musik
40	Intan Bestari	Teluk Sebong	Seni Tari
41	Bungsu Muda Legak Cahaya	Bintan Timur	Seni

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2019

Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut UU no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kabupaten Bintan juga telah menetapkan 23 Cagar Budaya yaitu:

Table 3.14

Daftar Cagar Budaya Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Nama Cagar Budaya	Jumlah
1	Situs Bukit Kerang	1
2	Situs Sejarah Dapur Arang	1
3	Situs Rumah Adat Melayu di Berakit	1
4	Makam Sultan Abdullah Mu'ayat Syah (Marhum Pulau Tambelan)	1
5	Makam Marhum Bukit Batu	1
6	Makam Tok Uke	1
7	Situs Sungai Tok Uke	1
8	Makam Panjang	1
9	Makam Sultan Ahmad	1
10	Makam Datuk Sang Ye	1
11	Makam Datuk Pantar.Sultan Ahamd Syah	1
12	Situs Kota Kara	1
13	Kompleks Makam Bukit Batu	1
14	Makam Putri Cempaka (Tuk Uke)	1
15	Makam Sang Setia, Tun Setia	1
16	Komplek Makam Kota Kara	1
17	Makam Said Ahmad	1
18	Makam Malim Dewa/ Mahesa Dewa	1
19	Makam Nahkoda Ragam dan Nahkoda Sekam	1
20	Makam Tua (Hang Tuah)	1
21	Makam Tuk Kepala Gendang (Mak Mulia)	1
22	Makam Datuk Julung	1
23	Makam Datuk Penaung	1
Jumlah		23

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia	≥70	73,41	73,98	105,69%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2014 BPS Indonesia mengubah metodologi perhitungan IPM, hal ini dikarenakan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; secara teknis penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Dengan perhitungan IPM metode baru maka indikator yang digunakan lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan adanya data rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam



Sumber: Diolah dari Data Makro Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Bintan-BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB juga lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Tingkat pencapaian pembangunan manusia diukur melalui indikator-indikator IPM yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi

yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik dengan mengacu pada kategori IPM yang telah ditetapkan. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Pencapaian IPM pada tahun 2019 di Kabupaten Bintan sudah tergolong kategori tinggi yaitu 73,98. Peningkatan umur harapan hidup (UHH) di tahun 2019 menjadi 70,30 tahun dapat merepresentasikan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bintan yang semakin baik yang terlihat dari panjang umur dan hidup yang sehat. Peningkatan pada angka harapan sekolah (HLS) menjadi 12,95 tahun maupun rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 8,33 tahun tentu memberikan sinyal yang positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah dan tamat dari sekolah tersebut yang pada akhirnya memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan kualitas manusia di Kabupaten Bintan.

Meskipun begitu Kabupaten Bintan masih tetap berpotensi untuk meningkatkan angka IPM melalui berbagai usaha secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara terintegrasi melalui pemanfaatan daripada sisi anggaran pemerintah, partisipasi swadaya masyarakat serta peran serta dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan capaian IPM menjadi sangat tinggi serta kondisi pembangunan manusia, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan.

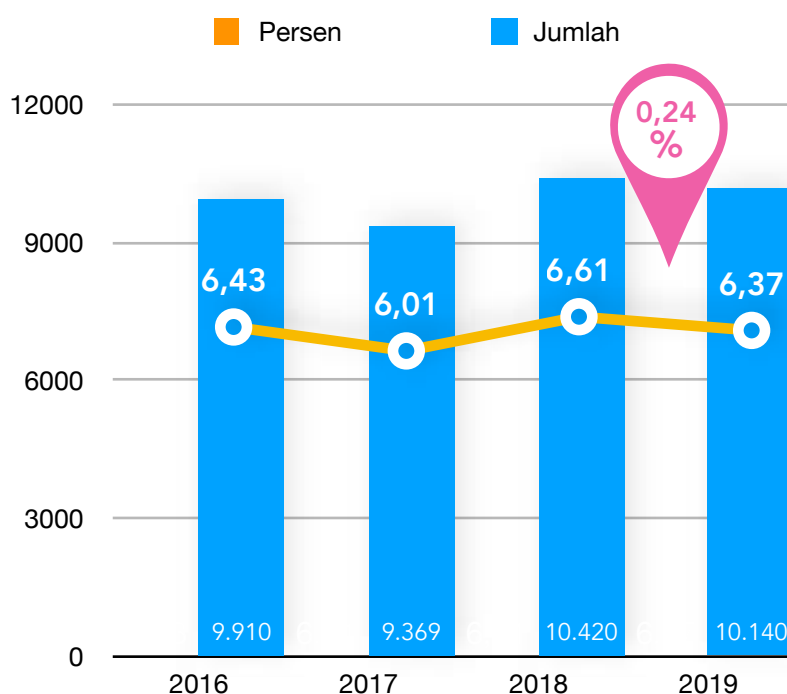
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Persentase Penduduk Miskin	< 6,5%	6,61%	6,37%	102,00%

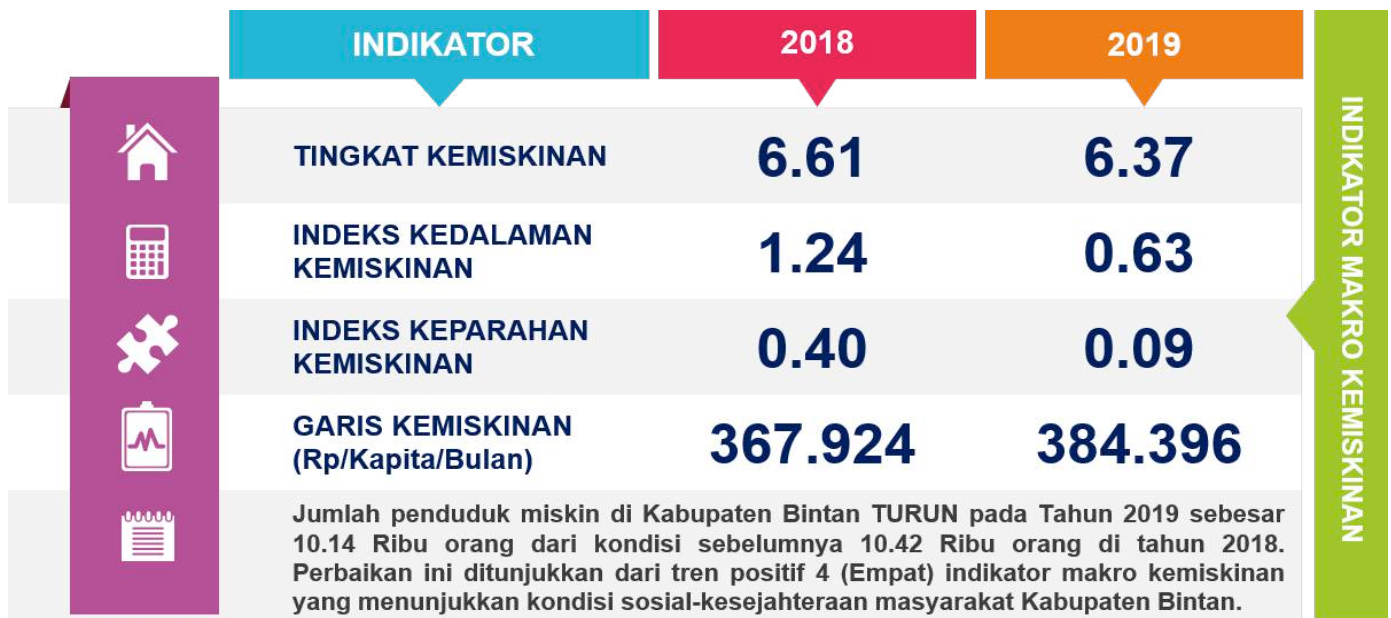
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (outcome) dalam menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2019 angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,24 persen menjadi 6,37 persen (%) yang sebelumnya pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah 6,61 persen (%), menurut data Badan Pusat Statistik, capaian angka kemiskinan Kabupaten Bintan ini masih diatas rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,90%.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bintan pada sepanjang tahun 2019 masih



disinyalir akibat kondisi ekonomi global yang memberikan dampak negatif terhadap kondisi makro ekonomi nasional-regional dan berdampak pada kondisi awal tahun 2018 dan baru mulai pulih di awal kuartal ke-4 di tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk menekan jumlah penduduk miskin melalui program dan kegiatan baik itu dari pusat maupun kebijakan strategis daerah yang menyasar langsung ke target penduduk miskin. Dari 4 (Empat) Indikator makro kemiskinan yaitu tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan di Kabupaten Bintan terus menunjukkan perkembangan positif terhadap kondisi sosial-kesejahteraan masyarakat. Secara umum kondisi makro kemiskinan kabupaten Bintan dapat terlihat pada infografis dibawah ini



Aktualisasi sinergitas government to government (G2G) daripada Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat terus dilakukan dalam upaya penting untuk menekan angka kemiskinan melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Seluruh upaya ini dapat terlaksana didukung seluruh stakeholder Kabupaten Bintan yang bersama-sama mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan Gender dalam Pembangunan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,41	92,58	92,79	100,41%

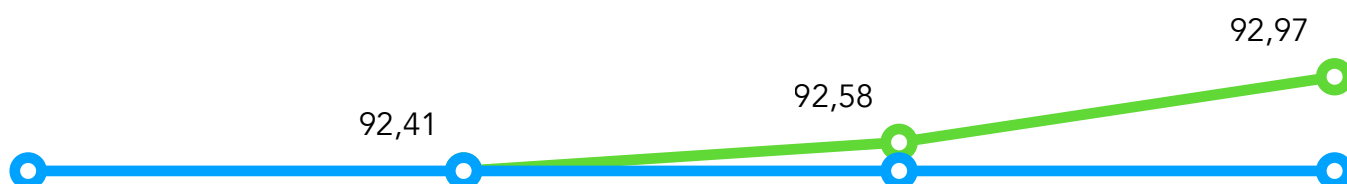
Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan Gender adalah perbedaan peran kedudukan tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma adat istiadat kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Index Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran kesenjangan pembangunan manusia terpilah, IPG merupakan rasio dari Index Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki terhadap Index Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender. Capaian IPG Kabupaten Bintan sebesar 92,79 dari target 92,41 dengan capaian kinerja 100,41 persen. Angka ini meningkat dibanding dari tahun sebelumnya yaitu 92,41 dan diatas IPG Nasional yaitu 90,96 namun masih berada dibawah IPG Provinsi Kepulauan Riau yaitu 92,97.

Capaian indikator ini dapat diwujudkan melalui Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2019. dengan melakukan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Anggota Keluarga ASN (Dharma Wanita) dan Peningkatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Meski mengalami peningkatan, namun Index Pembangunan Gender Kabupaten Bintan masih dapat terus ditingkatkan dengan melakukan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak agar kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat berkurang.



Tabel 3.15
Target dan Realisasi IPG Kabupaten Bintan
Tahun 2016 - 2019

	2016	2017	2018	2019
Target	92,41	92,41	92,41	92,41
Realisasi	-	92,41	92,58	92,97

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2019

Di Kabupaten Bintan, tercatat 6 orang anggota legislatif adalah Perempuan dari total 25 orang anggota legislatif yang artinya 24% dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan adalah Perempuan. Angka ini cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yaitu 5 orang atau 20%. Untuk lebih meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif perlu dilakukan Pelatihan dan sosialisasi politik kepada perempuan. Sedangkan disisi eksekutif, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bintan terdiri dari 1.506 orang laki-laki dan 1.782 orang perempuan yang berarti jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

SASARAN STRATEGIS 13

Meningkatnya peran generasi muda dan prestasi Olahraga

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	70%	73%	75%	107,14%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Pembinaan potensi dan pengembangan peran pemuda adalah tanggung jawab bersama Pemerintah dan Masyarakat. Melalui Organisasi Pemuda yang aktif diharapkan potensi dan pengembangan peran pemuda dalam pembangunan dapat meningkat signifikan. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki 75 persen Organisasi Kepemudaan yang Aktif, meningkat dari realisasi 73 persen di tahun 2018. Dengan target 70% organisasi kepemudaan yang aktif, Kabupaten Bintan mencapai 107,14 persen capaian kinerja.

Organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Bintan cukup banyak tetapi yang terdaftar resmi di Pemerintah Daerah hanya segelintir. Hal ini lah merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk membina organisasi dan diarahkan agar organisasi yang tersebut tidak hanya aktif di waktu - waktu tertentu saja. Agar Pembinaan potensi dan pengembangan peran pemuda berjalan dengan sesuai harapan Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini.

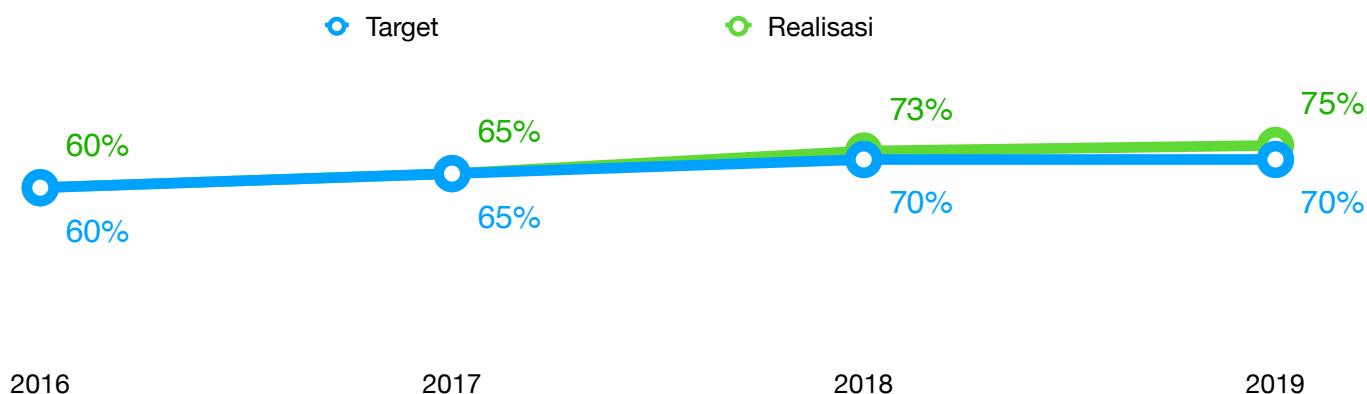


Table 3.16

Target Dan Realisasi Organisasi Pemuda Yang Aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Target	60%	65%	70%	70%
Reliasasi	60%	65%	73%	75%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan

Melalui Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan-kegiatan untuk pemuda ditahun 2019 indikator ini dapat dicapai. Pelatihan Pengembangan Pemuda dibidang digital printing

adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan pemuda untuk menyongsong Industri 4.0. Untuk meningkatkan rasa Nasionalisme para pemuda, Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Temu Wicara Kepemudaan, Kegiatan dilaksanakan pada hari sumpah pemuda ke-90 dengan tema “Bangun Pemuda Satukan Indonesia”. Sedangkan untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan peran serta pemuda dalam menciptakan lingkungan hijau dan asri dilaksanakan kegiatan Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA),.

Pembinaan ESQ bagi Pemuda di Kabupaten Bintan yang pesertanya terdiri dari unsur mahasiswa dan pemuda Kabupaten Bintan juga dilaksanakan dengan maksud menumbuh kembangkan kepribadian, karakter tangguh dan memadukan konsep kecerdasan intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) secara terinterasi dan transendental. Sehingga dapat mencapai nilai-nilai dasar tersebut dan membantu membangkitkan dan mengarahkan seluruh potensi diri pemuda agar lebih produktif, lebih aktif dan lebih berhasil.

SASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Persentase ketersediaan pangan Masyarakat	100%	100%	118%	118%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman merata dan terjangkau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya mewujudkan ketahanan pangan harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut perlu dilakukan

1. Pengembangan sistem produksi
2. Efisiensi sistem usaha pangan
3. Teknologi produksi pangan
4. Sarana dan prasarana produksi pangan dan

5. Memperhatikan dan mengembangkan lahan produksi.

Oleh karena itu salah satu faktor keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan mulai dari pra panen pasca panen dan distribusi/pemasaran melalui penyelenggaraan penyuluhan dalam upaya memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha meningkatkan semangat wawasan kecerdasan ketrampilan serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kepribadian yang mandiri.

Ketersediaan Pangan Masyarakat di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 mencapai 118% dari target 100% yang ditetapkan. Berbagai faktor diatas mendukung Kabupaten Bintan dalam mencapai target 100% pada Indikator Persentase Ketersediaan pangan Masyarakat.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai salah satu lembaga teknis yang bertanggungjawab terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan khususnya di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan telah mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki termasuk potensi sumberdaya manusia.

Ketersediaan Pangan utama yakni beras, gula, tepung, minyak goreng, palawija dan jagung di Kabupaten Bintan. Target yang ditetapkan sebesar 550 Kg/kap/th, capaiannya sebesar 576 Kg/kap/th. Sedangkan Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) ketersediaannya berada di Kantor BULOG Sub Divisi Tanjungpinang dimana Kabupaten Bintan juga termasuk didalamnya dari target yang ditetapkan 5.200 kg dapat direalisasikan 5.600 kg. Dalam pengelolaannya, Cadangan Pangan Pemerintah berupa beras ini gunakan untuk :

1. Sebagai persediaan yang siap salur sewaktu-waktu bagitu ada bencana.
2. Disalurkan kepada masyarakat pasca bencana alam : angin, puting beliung, banjir, kebakaran, gempa, tanah longsor dan lain-lainnya.
3. Gejolak harga beras dengan kenaikan 25 % selama 2 minggu berturut-turut.

Pada tahun 2018, capaian produksi tanaman pangan sebesar 4.290 Ton sedangkan pada tahun 2019 capaian produksi tanaman pangan sebesar 8.540 Ton. Kabupaten Bintan pada tahun 2019 pencapaian produktivitas tanaman pangan sebesar 8,8 Ton/Ha, Peningkatan produksi tanaman pangan dapat tergambar dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Bintan Tahun 2019

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Jagung	96	90	747
Kedelai	0	0	0
Ubi Kayu	168,8	124	4.960
Ubi Jalar	61	60	2.400
Kacang Tanah	35	34	277
Kacang Hijau	0	0	0

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Talas	5	5	10
Padi	40,5	36,5	146
Tahun 2019	406,3	349,5	8.540
Tahun 2018	589	477	4290

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2019

Produktivitas Tanaman Hortikultura Kabupaten Bintan juga meningkat, ada tahun 2018 atau pada kondisi kinerja awal, capaian produksi tanaman sayuran sebesar 239.07,2 Ton, luas penanaman ± 1.947 Ha, luas panen ± 2.011 Ha, dan jumlah produksi ± 239.07,2 Ton. Komoditi sayur- sayuran yang dominan di Kabupaten Bintan seperti kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, buncis, dan lain – lain. Pada tahun 2019 capaian produksi tanaman sayuran sebesar 969.56 Ton. Hal tersebut dapat diartikan bahwa target peningkatan produksi tanaman sayuran dapat terealisasi. Peningkatan produksi tanaman sayuran dapat tergambar dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.18

Rpduksi Tanama Sayuran Kabupaten Bintan Tahun 2019

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Bawang Merah	39,5	25,3	57,3
Bawang Daun	45	19,5	49,8
Sawi	171	134	1.143,1
Kacang Panjang	314	314	707,7
Cabe Keriting	314	300	452
Cabe Rawit	262	250	265,6
Buncis	178	170	522,3
Ketimun	255	230	1.035,2
Tomat	25	12,5	186,2
Terung	151	39	225,5
Kangkung	174	156,5	1.663,4
Bayam	144	118	1.374,6
Paria	35	35	350
Gambas	35	35	280
Jeruk Kasturi	38	61	2.934
Semangka	194	188	1.382,9
Tahun 2019	2.374,5	2.087,8	12.629,6

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Tahun 2018	1.947	2.011	23.907,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2019

Pada tahun 2018 target produksi tanaman buah-buahan yang ditetapkan pada tahun sebesar 818,40 Ton. Pada tahun 2019 capaian produksi tanaman buah-buahan sebesar 781,5 Ton. Dalam hal ini memang terjadi penurunan jumlah produksi tanaman buah- buahan dari tahun 2018 ke tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena kemarau yang panjang di awal tahun dan diakhir tahun curah hujan diwilayah Kabupaten Bintan sangat tinggi yang menyebabkan tingginya kerontokan bakal buah. Pencapaian Produktivitas tanaman hortikultura unggulan daerah (ton/Ha) pada Tahun 2019 dengan target realisasi adalah 6,1 Ton / Ha namun Kabupaten Bintan berhasil mencapai produksi sebesar 12,27 Ton / Ha, dua kali lipat dari target yang ditetapkan.

Table 3.18
Produksi Buah Buahan Kabupaten Bintan Tahun 2019

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Alpukat	13	26	290,9
Belimbing	14	20	359
Duku/Langsar	24	11	569,8
Durian	277	277	4.603,2
Jambu Biji	25	33	528,1
Jambu Air	25	34	504
Jeruk kasturi	38	61	853,4
Jeruk Besar	8	10	241,5
Mangga	181	212	3.241,1
Manggis	48	96	1.034,2
Nangka/Cempedak	248	319	3.995,2
Nanas	16.681	11.802	22.749,7
Pepaya	347	621	6.167,7
Pisang	1.300	1.300	21.416,4
Rambutan	228	298	4.213,6
Salak	50	100	29.667,7
Sawo	50	100	2.297,1
Markisa	0	0	0
Sirsak	106	106	2.136,6
Sukun	50	50	2.765,8

Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Melinjo	75	75	1.382
Petai	152	218	2.876,4
Jengköl	179	193	1.856,8
Tahun 2019	20.119	15.962	113.750,2
Tahun 2018	3.120	1.413	818,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2019

Target jumlah produksi daging dan telur untuk tahun 2018 adalah sebesar 2.570,98 ton (daging) dan 1.790,02 ton (telur) terealisasi sebesar 2.695,24 ton (daging) (104,83%) dan 2.088,12 ton (telur) (116,66 %). Pada tahun 2019, target jumlah produksi daging dan telur adalah sebesar 2.571,43 ton (daging) dan 1.790,07 ton (telur) terealisasi sebesar 2.928,11 ton (daging) (113,87 %) dan 2.142,36 ton (telur) (119,68 %).

Meningkatnya jumlah populasi daging dan telur ini dikarenakan meningkatnya jumlah populasi ternak di Kabupaten Bintan. Kondisi ini didukung dengan tersedianya petugas di lapangan sehingga kesehatan hewan dapat terawasi dan populasi ternak dapat ditingkatkan. Populasi keseluruhan ternak di Kabupaten Bintan tahun 2019 tercatat sebagai berikut ternak sapi 943 ekor, babi 1.024 ekor, kambing 1.924 ekor, ayam ras petelur 198.600 ekor, ayam ras pedaging 562.000 ekor, ayam buras 168.038 ekor, itik 9.262 ekor dan puyuh 16.400 ekor.

Table 3.20
Produksi Daging dan Telur Tahun 2019

Kecamatan	Sapi (ekor)	Babi (ekor)	Kambing (ekor)	Ayam Ras Petelur (ekor)	Ayam Ras Pedaging (ekor)	Ayam Buras (ekor)	Itik (ekor)	Puyuh (ekor)
Teluk Bintan	220 -		442	26.000	61.000	13.000	120	400
Bintan Utara	50 -		35	5.000	25.865	25.786	600 -	
Teluk Sebong	188	188	159	20.000	48.000	26.220	635 -	
Seri Kuala								
Bintan Timur	121	210	45	11.650	110.600	53.035	1.466	15.000
Gunung Kijang	67	138	368	11.950	35.935	19.732	425	1.000
Mantang	-	-	25 -	-	-	566	55 -	
Bintan Pesisir	-	-	320 -	-	-	3.500	250 -	
Toapaya	277	488	330	124.000	280.600	22.697	5.650 -	
Tambelan	20 -		200 -	-	-	3.502	61 -	
2019	943	1.024	1.924	198.600	562.000	168.038	9.262	16.400
2018	850	979	1.888	198.600	600.000	185.551	9.717	8.400

Kecamatan	Sapi (ekor)	Babi (ekor)	Kambing (ekor)	Ayam Ras Petelur (ekor)	Ayam Ras Pedaging (ekor)	Ayam Burah (ekor)	Itik (ekor)	Puyuh (ekor)
2017	825	480	1.847	198.600	600.000	183.785	7.362	6.000
2016	725	480	1.708	198.600	600.000	183.485	7.338	1.000

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS 15

Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Serta Upaya meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup secara Berkelanjutan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisas 2019	Capaian Kinerja
Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	70	n/a	63,85%	91,21%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai PIj > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
2. Hitung indeks pencemaran (Plj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
3. Penentuan Indeks Kualitas Air berdasarkan nilai dari Plj sebagai berikut:
 - a. Indeks Kualitas Air = 100, untuk $Plj \leq 1$,
 - b. Indeks Kualitas Air = 80, untuk $Plj > 1$ dan $Plj \leq 4,67$ (4,67 adalah nilai Plj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I)
 - c. Indeks Kualitas Air = 60, untuk $Plj > 4,67$ dan $Plj \leq 6,32$ (6,32 adalah nilai Plj dari baku mutu kelas III terhadap kelas I),
 - d. Indeks Kualitas Air = 40, untuk $Plj > 6,32$ dan $Plj \leq 6,88$ (6,88 adalah nilai Plj dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I)
 - e. Indeks Kualitas Air = 20, untuk $Plj > 6,88$
4. Selanjutnya Nilai Indeks Kualitas Air setiap provinsi dihitung dari rata-rata Indeks Kualitas Air semua sampel dalam provinsi tersebut.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

- (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- (c) penggunaan air; dan
- (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.

Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan serta pelaku usaha. Berdasarkan Hasil pengukuran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan pada tahun 2019 kualitas air di Kabupaten Bintan adalah sebesar 63,85 poin masih dalam kategori baik.

Guna meningkatkan kualitas air di Kabupaten Bintan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan selalu melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan juga melakukan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Penataan Hukum Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Pemantauan dan Penganggulan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Capaian Kinerja
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	1	n/a	1	100%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di

beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan:

1. sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
2. sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Indeks kualitas udara nasional dihitung dari Indeks kualitas udara masing-masing provinsi di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu :

- a. pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler yang dilakukan dengan APBN melalui mekanisme dekonsentrasi kepada provinsi;
- b. pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan oleh daerah dengan menggunakan APBD.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu "Common Information to European Air" (Citeair II) dengan Judul CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accross Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI) ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks > 1, berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar UE. Sebaliknya apabila nilai indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Tabel 3.21

Standar Kualitas Udara Berdasarkan EU Directives

Air Quality	Index Value (I EU)
EU Standards are exceeded by one pollutant or more	>1
EU Standards are fulfilled on average	1
The situation is better than the norms requirements on average	<1

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tercatat diangka 1 poin artinya kualitas udara di Kabupaten Bintan memenuhi standar EU. Angka ini sesuai target yang ditetapkan di Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan yakni 1 poin dengan capaian kinerja 100% ini Kabupaten Bintan harus mempertahankan Kualitas Udaranya.

Nilai Indeks Kualitas Udara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Pusat, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 senantiasa dianut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019.

Realisasi Pendapatan

Tabel 3.22

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2017 (dalam rupiah)

KOMPONEN	REALISASI			REALISASI	
	2017	2018	%	2019	%
Pendapatan Asli Daerah	224.986.379.241,10	265.020.513.500,05	117,79	372.151.880.597,74	140,42
Pajak Daerah	181.122.766.938,88	209.689.787.533,74	115,77	300.131.802.766,81	143,13
Retribusi Daerah	8.885.221.765,00	10.391.753.897,00	116,96	19.026.602.431,00	183,09

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.636.447.387,00	13.994.946.188,00	95,62	12.120.731.219,00	86,61
Lain-lain PAD yang Sah	20.341.943.150,22	30.944.025.881,31	152,12	40.872.744.180,93	132,09
Dana Perimbangan	712.750.581.449,00	740.417.202.564,00	103,88	805.321.051.217,00	108,77
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	225.732.577.919,14	140.258.373.448,00	62,13	126.901.263.101,00	90,48
Dana Alokasi Umum	159.887.600.000,00	484.586.669.000,00	303,08	514.706.921.000,00	106,22
Dana Alokasi Khusus	9.632.000.000,00	115.572.160.116,00	1199,88	163.712.867.116,00	141,65
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	89.793.806.415,00	101.412.803.097,00	112,94	144.436.518.884,17	142,42
Jumlah	1,027,530,767,105,10	1,106,850,519,161,05	107,72	1,321,909,450,698,91	119,43

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Tren pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan terus meningkat, dari tahun 2017 224 milyar naik 117,79 persen menjadi 285 milyar dan kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 372 milyar yang sama dengan 140,42 persen.

Realisasi Belanja

Pada Tahun 2019 Anggaran Belanja Kabupaten Bintan sebesar Rp1.464.158.403.537,97 dengan peribangan Belanja Tidak Langsung Rp656.577.889.240,96 (44,84%) dan belanja langsung Rp807.580.5142.97,01 (55,16%). Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bintan sebesar Rp1.327.556.986.977,38 dengan Rp603.208.321.803,00 (91,87%) realisasi belanja tidak langsung dan Rp724.348.665.174,38 (89,69%) realisasi belanja langsung.

Tabel 3.23
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bintan
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Tidak Langsung	656.577.889.240,96	603.208.321.803,00	91,87
5.1.1	Belanja Pegawai	502.709.954.759,96	456.494.527.991,00	90,81
5.1.4	Belanja Hibah	16.798.210.000,00	15.398.498.000,00	91,67
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.005.404.000,00	7.403.293.430,00	73,99

5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	125.064.320.481,00	123.910.502.382,00	99,08
5.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08
5.2	Belanja Langsung	807.580.514.297,01	724.348.665.174,38	89,69
5.2.1	Belanja Pegawai	110.278.217.528,70	97.706.108.803,00	88,60
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.780.095.226,91	327.801.233.771,45	90,11
5.2.3	Belanja Modal	333.522.201.541,40	298.841.322.599,93	89,60
	Jumlah Belanja	1.464.158.403.537,97	1.327.556.986.977,38	90,67

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Tabel 3.24
realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Urusan
Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/OPD	Anggaran	Realisasi	%
5.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	790.665.774.984,97	732.816.329.505,38	92,68
5.1.01	Pendidikan	281.960.124.009,97	265.500.234.963,38	94,16
5.1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan	281.960.124.009,97	265.500.234.963,38	94,16
5.1.02	Kesehatan	181.557.204.775,00	167.024.419.474,00	92,00
5.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	181.557.204.775,00	167.024.419.474,00	92,00
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.778.217.278,00	131.189.119.294,00	88,18
5.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.778.217.278,00	131.189.119.294,00	88,18
5.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	127.793.538.892,00	121.770.180.900,00	95,29
5.1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	127.793.538.892,00	121.770.180.900,00	95,29
5.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	37.586.738.234,00	35.154.392.258,00	93,53
5.1.05.1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.662.521.513,00	6.116.144.646,00	91,80
5.1.05.1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	21.633.728.299,00	20.313.337.115,00	93,90
5.1.05.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.290.488.422,00	8.724.910.497,00	93,91
5.1.06	Sosial	12.989.951.796,00	12.177.982.616,00	93,75
5.1.06.1.06.01	Dinas Sosial	12.989.951.796,00	12.177.982.616,00	93,75
5.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	143.222.397.416,00	120.823.849.953,00	84,36

5.2.01	Tenaga Kerja	6.481.679.252,00	5.844.787.091,00	90,17
5.2.01.2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	6.481.679.252,00	5.844.787.091,00	90,17
5.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.769.309.896,00	6.484.101.424,00	95,79
5.2.02.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.769.309.896,00	6.484.101.424,00	95,79
5.2.03	Pangan	13.772.013.832,00	12.166.479.932,00	88,34
5.2.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.772.013.832,00	12.166.479.932,00	88,34
5.2.04	Pertanahan	8.594.324.400,00	518.827.290,00	6,04
5.2.04.4.01.02	Sekretariat Daerah	8.594.324.400,00	518.827.290,00	6,04
5.2.05	Lingkungan Hidup	9.476.092.141,00	8.830.697.350,00	93,19
5.2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	9.476.092.141,00	8.830.697.350,00	93,19
5.2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	10.855.656.950,00	10.092.495.596,00	92,97
5.2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.855.656.950,00	10.092.495.596,00	92,97
5.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.207.773.988,00	7.619.876.422,00	92,84
5.2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.207.773.988,00	7.619.876.422,00	92,84
5.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.122.506.228,00	3.656.506.213,00	88,70
5.2.08.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.122.506.228,00	3.656.506.213,00	88,70
5.2.09	Perhubungan	15.385.336.696,00	14.290.278.034,00	92,88
5.2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan	15.385.336.696,00	14.290.278.034,00	92,88
5.2.10	Komunikasi dan Informatika	19.421.227.599,00	16.753.850.601,00	86,27
5.2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.421.227.599,00	16.753.850.601,00	86,27
5.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.078.884.760,00	7.618.246.454,00	94,30
5.2.11.2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	8.078.884.760,00	7.618.246.454,00	94,30
5.2.12	Penanaman Modal	11.671.530.590,00	10.015.430.753,00	85,81
5.2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.671.530.590,00	10.015.430.753,00	85,81
5.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	10.850.899.852,00	8.173.894.460,00	75,33
5.2.13.2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.850.899.852,00	8.173.894.460,00	75,33

5.2.14	Statistik	0,00	0,00	0,00
5.2.14.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
5.2.15	Persandian	135.000.000,00	110.519.848,00	81,87
5.2.15.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	135.000.000,00	110.519.848,00	81,87
5.2.16	Kebudayaan	3.229.676.000,00	2.748.182.095,00	85,09
5.2.16.3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.229.676.000,00	2.748.182.095,00	85,09
5.2.17	Perpustakaan	6.019.077.232,00	5.749.990.184,00	95,53
5.2.17.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.019.077.232,00	5.749.990.184,00	95,53
5.2.18	Kearsipan	151.408.000,00	149.686.206,00	98,86
5.2.18.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	151.408.000,00	149.686.206,00	98,86
5.3	Urusan Pilihan	42.737.713.386,00	37.977.159.049,00	88,86
5.3.01	Kelautan dan Perikanan	19.528.279.638,00	17.123.087.200,00	87,68
5.3.01.3.01.01	Dinas Perikanan	19.528.279.638,00	17.123.087.200,00	87,68
5.3.02	Pariwisata	16.401.900.498,00	15.073.835.448,00	91,90
5.3.02.3.02.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.401.900.498,00	15.073.835.448,00	91,90
5.3.03	Pertanian	3.954.347.600,00	3.562.581.101,00	90,09
5.3.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.954.347.600,00	3.562.581.101,00	90,09
5.3.06	Perdagangan	1.952.470.650,00	1.379.647.345,00	70,66
5.3.06.2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.952.470.650,00	1.379.647.345,00	70,66
5.3.07	Perindustrian	900.715.000,00	838.007.955,00	93,04
5.3.07.2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	900.715.000,00	838.007.955,00	93,04
5.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	487.532.517.751,00	435.939.648.470,00	89,42
5.4.01	Administrasi Pemerintahan	205.822.770.905,00	182.936.160.194,00	88,88
5.4.01.4.01.01	Sekretariat DPRD	37.659.632.364,00	33.836.331.183,00	89,85
5.4.01.4.01.02	Sekretariat Daerah	79.946.193.521,00	72.936.024.640,00	91,23
5.4.01.4.01.03	Kecamatan Bintan Timur	16.850.681.952,00	13.382.616.296,00	79,42
5.4.01.4.01.04	Kecamatan Gunung Kijang	9.535.642.254,00	8.831.965.491,00	92,62
5.4.01.4.01.05	Kecamatan Teluk Bintan	6.971.834.210,00	5.724.917.020,00	82,11
5.4.01.4.01.06	Kecamatan Bintan Utara	14.642.956.327,00	12.046.516.401,00	82,27
5.4.01.4.01.07	Kecamatan Teluk Sebong	7.344.797.550,00	6.868.934.049,00	93,52

5.4.01.4.01.08	Kecamatan Tambelan	6.416.373.928,00	5.741.289.356,00	89,48
5.4.01.4.01.09	Kecamatan Seri Kuala Lobam	9.579.904.127,00	7.881.715.719,00	82,27
5.4.01.4.01.10	Kecamatan Toapaya	8.696.339.058,00	8.269.380.246,00	95,09
5.4.01.4.01.11	Kecamatan Bintan Pesisir	3.939.676.524,00	3.678.754.493,00	93,38
5.4.01.4.01.12	Kecamatan Mantang	4.163.739.090,00	3.665.051.500,00	88,02
5.4.01.4.02.01	Inspektorat Daerah	75.000.000,00	72.663.800,00	96,89
5.4.02	Pengawasan	11.291.316.596,00	10.184.926.816,00	90,20
5.4.02.4.02.01	Inspektorat Daerah	11.291.316.596,00	10.184.926.816,00	90,20
5.4.03	Perencanaan	19.155.549.796,00	16.441.032.375,00	85,83
5.4.03.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.757.800,00	77.036.976,00	88,80
5.4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.068.791.996,00	16.363.995.399,00	85,82
5.4.04	Keuangan	225.876.063.215,00	209.485.774.261,00	92,74
5.4.04.4.04.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah	200.689.431.709,00	185.458.529.184,00	92,41
5.4.04.4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	25.186.631.506,00	24.027.245.077,00	95,40
5.4.05	Kepegawaian	23.975.493.239,00	15.647.361.904,00	65,26
5.4.05.4.05.06	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.975.493.239,00	15.647.361.904,00	65,26
5.4.07	Penelitian dan Pengembangan	1.411.324.000,00	1.244.392.920,00	88,17
5.4.07.4.03.01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.411.324.000,00	1.244.392.920,00	88,17

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melaksanakan amanahnya berlandaskan pada tujuan sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penetapan Kinerja/Kontrak Kinerja Bupati Bintan Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan gambaran bahwa keberhasilan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara masyarakat dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan adalah :

1. Sebagian besar instansi Pemerintah Kabupaten Bintan sudah memahami cara penyusunan Laporan Kinerja namun karena keterbatasan waktu dan kurangnya penyampaian data oleh SKPD menghambat pengumpulan data dan penyusunan menjadi terlambat
2. Belum adanya standar yang valid dan akurat sebagai acuan kinerja kegiatan kegiatan dan sasaran-sasaran yang dilaksanakan mengakibatkan indikator kinerja dan satuan pengukurannya sering kali bias dan sulit ditelusuri antara lain satuan pengukuran kinerja outcome masih menggunakan persentase sehingga data tersebut akan tergantung dengan data lain dan sifat (uncontrollable) yang tentunya indikator kerjanya yang bias dan semu

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan dan Permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk kemajuan Kabupaten Bintan beberapa saran perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah dan dunia usaha.
4. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi dari setiap satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur bermanfaat dan akuntabel.
5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.
6. Menjadikan hasil REVIU dari APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebagai perbaikan SAKIP di SAKIP Kabupaten Bintan dan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.